

LAPORAN



Kelompok

Kerjaja

Tematis

**RAN PE
TAHUN 2022**



**Pandangan dan temuan dalam laporan
ini merupakan pandangan dan temuan
Kelompok Kerja Tematis**

Executive Summary



Kehadiran Pokja tematis mengukuhkan masih adanya ruang sipil di Indonesia. Ini merupakan contoh baik tentang keterlibatan masyarakat sipil yang formal dalam sistem negara demokratis. Laporan perdana Pokja Tematis ini diharapkan sebagai langkah lebih tersistematis untuk membuat visible kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Pada tahun 2022, total kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat sipil adalah 97 program dan kegiatan dari 25 organisasi yang menyerahkan laporan. Pekerjaan OMS tersebar di 17 provinsi, dengan lima provinsi terpopuler yaitu Jawa Barat (14), Jawa Tengah (10), Jawa Timur (8), Sulawesi Tengah (8), Banten (5)



Total penerima manfaat adalah 18.772 orang, dimana 7 disabilitas, 5.316 laki-laki, 3.432 perempuan, dan ada 10.024 yang tidak secara khusus teridentifikasi. Jumlah yang tidak teridentifikasi ini dikarenakan sejumlah organisasi tidak menyerahkan data terpilah. Aktor yang terlibat dalam kerja-kerja OMS sangat beragam, di antaranya adalah aktor pemerintah, kader PKK, anak muda, pendidik (guru dan dosen), pemuka agama, penyintas teroris, dan pelajar -mahasiswa. Total aktor yang dilaporkan adalah 10.546, dengan jumlah aktor pelajar dan mahasiswa menduduki terbanyak disusul dengan aktor agama dan pendidik.

Total produk yang dihasilkan oleh OMS adalah 2.375 buah, yang didominasi dengan produksi konten digital (1.378), artikel (681), video film (141), podcast (76), materi khutbah (56), modul (17), publikasi riset (6), SOP/ pedoman (6), kebijakan (4), buku (8), virtual exhibition (1).

Pada bagian tren terorisme di Indonesia, laporan mengulas tentang perkembangan terorisme yang menguat di sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak pernah menjadi target terorisme, termasuk dinamika keterlibatan perempuan dan anak yang masih menjadi tren terorisme Indonesia ke depan.

Pada bidang-bidang yang menjadi fokus garapan Pokja Tematis, laporan menyuguhkan sejumlah perkembangan positif dan gaps yang berhubungan dengan upaya penguatan gender mainstreaming terjadi di produk delegasi Perpres No. 7 tahun 2021 tentang RAN PE. Pada perlindungan saksi dan korban, tuntutan masih difokuskan pada pentingnya *database* dan dukungan jangka panjang untuk korban terorisme. Inovasi dan kreatifitas anak-anak muda dalam mendorong transformasi di lembaga pendidikan, masih bersifat tidak sistemik.

Pada Pengarusutamaan Gender (PUG), kekuatan leadership perempuan mendominasi sejumlah advokasi di daerah dan nasional, termasuk memastikan gender indicators terintegrasikan dalam sejumlah intervensi. Bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial menggambarkan kerjasama positif dari lintas aktor negara dan non negara dalam menyuguhkan model penanganan mantan napiter, deportan, dan returni, yang lebih partisipatif dengan dialog, berbasis pada komunitas, khususnya dengan hadirnya forum multi stakeholders yang menjaga dinamika koordinasi, serta memastikan semua dukungan kebijakan.

Bidang kesiapsiagaan, OMS berkontribusi pada penguatan *leadership* dan organisasi perempuan, pemuda dan institusi pendidikan. Menjamurnya ruang-ruang perjumpaan yang digagas oleh organisasi anak muda membuat pilar penting ini bergerak, sekaligus mendorong keterbukaan nasional untuk menghadirkan keterlibatan lebih bermakna.

Sejumlah praktik baik pada bidang kesiapsiagaan nasional, bertumpu pada empat hal yaitu: **pertama**, mekanisme Pokja Tematis, dimana aktor non negara terlibat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme yang resmi. Pokja Tematis tidak saja menjaga ruang sipil tetap ada, tetapi membantu mendinamisir internal pemerintah, dengan masukan konstruktif di tujuh bidang, agar pemerintah tetap akutable dalam menjalankan program semua pilar RAN PE.

Kedua, penguatan daerah dalam implementasi RAN PE, dimana dengan kerjasama lintas aktor, kini daerah memiliki regulasi yang jelas, rencana strategis daerah, tim pelaksana yang kuat dilengkapi dengan mekanisme koordinasi dalam forum *multistakeholder*, dan keberadaan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan yang resilien.

Ketiga, model reintegrasi sosial yang menggunakan pendekatan *peacebuilding*, dimana proses peningkatan *social acceptance* di masyarakat terhadap mantan napiter, deportan dan returne didorong dengan pendekatan dialog menyisir seluruh klaster masyarakat. Seri dialog menghantarkan pada forum rekonsiliasi dimana proses “menerima” dan “diterima” terjadi antara keluarga mantan napiter dengan masyarakat.

Keempat, ruang-ruang perjumpaan akar rumput yang disuburkan oleh kelompok anak-anak muda, mampu membangun pertukaran pengalaman, perspektif, dan potensi yang dimiliki para pemuda lintas iman.

Akhirnya sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini merujuk pada tiga hal yaitu pentingnya sebuah aturan yang jelas tentang *data sharing*, dorongan pada SekBer RAN PE untuk membuat mekanisme dukungan yang jelas untuk masyarakat sipil, dan usulan institusionalisasi sejumlah praktik baik yang telah teruji digagas oleh OMS.



Kata

Pengantar

Index terorisme global untuk Indonesia naik pada peringkat ke 24. Apa maknanya? Ada dua kemungkinan yang bisa kita lihat yaitu perluasan definisi dalam UU tindak pidana terorisme memicu banyak penangkapan kepada aktor-aktor baik yang langsung terlibat maupun tidak langsung terlibat. Kemungkinan kedua adalah memang terjadi peningkatan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di sejumlah daerah.

Menurut PAKAR, ada sejumlah pergeseran dinamika yang terjadi dalam konteks ekstremisme kekerasan di Indonesia. **Pertama**, pergeseran kelompok islamis yang mengarah pada extremist dan kelompok yang *extremist* mengarah pada ormas Islam pada umumnya. Sejumlah organisasi yang tidak dikategorikan ekstrem mengadopsi cara-cara berdakwa yang ekstrem. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang berafiliasi jelas dengan ekstremisme, menunjukkan perubahan yang kuat pada cara-cara memenangkan pikiran dan hati publik yaitu melalui program pemberdayaan dan peduli lingkungan.

Kedua, kondisi geopolitik dengan dengan jatuhnya ISIS di Syria dan kemenangan Taliban di Afghanistan serta panggilan berjihad ke bumi Khorasan sangat mungkin menginspirasi kelompok-kelompok jihadis dan membuka pintu jaringan Indonesia ke Afghanistan. Ini akan menjadi atraksi kuat bagi kelompok *extremist*.

Berbagai perkembangan ekstremisme ini, mendorong masyarakat sipil untuk melakukan sejumlah manuver penting agar keterlibatan bermakna OMS dalam mempengaruhi kebijakan yang lebih *peaceful* terjadi. Hadirnya Pokja Tematis merupakan upaya keras OMS Indonesia untuk membuka ruang sipil agar pelaksanaan kebijakan RAN PE dijalankan dengan proses yang inklusif, transparan dan akuntabel.

Laporan tahunan perdana Pokja Tematis ini bertujuan sebagai media konsolidasi pengetahuan OMS berbagai latar belakang dalam menjalankan segala intervensi program PE. Selain memberikan *update* tentang bidang pengarusutamaan gender, perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban, keterlibatan anak muda, komunikasi strategis, kesiapsiagaan nasional, rehabilitasi dan reintegrasi, hukum dan HAM, juga memberikan usulan kepada SekBer RAN PE untuk menciptakan ruang *exchange learning* yang lebih substansial dimana keempat Pokja hendaknya bisa bertemu, sehingga bisa saling memperkuat dan mempengaruhi. Keberadaan masyarakat sipil dalam SekBer, seharusnya bisa mendorong pemerintah melakukan *beyond business as usual*.

Laporan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi penting yaitu pentingnya aturan yang jelas tentang *data sharing*, dorongan pada sekber untuk membuat mekanisme dukungan yang jelas untuk masyarakat sipil, dan usulan institusionalisasi sejumlah praktik baik yang telah teruji digagas oleh OMS.

Akhir kata, selamat membaca laporan Pokja Tematis.

Jakarta, 10 Februari 2023

Ketua Pokja Tematis

Daftar Isi

Executive Summary	3
Kata Pengantar	6
Daftar Isi	8
1. PENDAHULUAN	10
1.1 Membaca Perkembangan Ekstremisme	10
1.2 Regulasi Pencegahan Penanganan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia ...	11
1.3 Mekanisme Sekber dan Dukungan pada OMS.....	12
2. PERAN DAN FUNGSI OMS DALAM PELAKSANAAN RAN PE	18
2.1 Fungsi Koordinasi dan Konsolidasi	18
2.2 Fungsi Konsultatif	19
2.3 Fungsi Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi (Penilaian)	19
3. PERKEMBANGAN RAN PE DAN INTERVENSI MASYARAKAT SIPIL	21
3.1 Bidang Pengarusutamaan Gender	21
3.2 Bidang Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak-Hak Korban	23
3.3 Bidang Keterlibatan Pemuda	25

3.4 Bidang Komunikasi Strategis ;	28
3.5 Bidang Kesiapsiagaan Nasional	31
3.6 Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial	34
3.7 Bidang Hukum dan HAM	36
4. TANTANGAN DAN HAMBATAN	41
5. MEMBACA TREN BARU VE DAN PENTINGNYA REORIENTASI INTERVENSI.	43
6. REKOMENDASI-REKOMENDASI	47
7. PRAKTIK-PRAKTIK BAIK	51
8. PENUTUP	59

PENDAHULUAN

1.1 Membaca Perkembangan Ekstremisme

Jika merujuk pada bacaan para ahli, ditambah meningkatnya jumlah penangkapan masif yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 selama dua tahun terakhir, kondisi ekstremisme di Indonesia masih tinggi. Tahun 2022, Densus 88 telah menangkap 26 terduga teroris itu dari jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), Jamaah Islamiyah (JI) dan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Aparat keamanan juga menangkap sejumlah perempuan yang melakukan aksi nekat menerobos keamanan di markas besar Polri, seperti Zakia Aini dan Siti Elina yang berusaha menerobos di istana negara. Keduanya diduga tidak memiliki asosiasi resmi dengan kelompok ekstrimis. Mereka adalah lone wolf (lone wolf terrorism), yaitu teroris yang bergerak sendirian, beroperasi sendiri, tanpa bantuan dari kelompok manapun, dan di luar struktur organisasi atau komando teroris formal.

Tampaknya tren penggunaan tubuh perempuan dan anak masih menjadi tren terorisme di Indonesia. Meskipun ISIS tidak lagi berjaya, tetapi pengaruh dan pesonanya masih melekat di sejumlah orang. Ajaran ISIS juga masih banyak disosialisasikan dan sejumlah tokoh-tokohnya masih aktif menjalankan perekrutan. Media sosial dan internet menjadi penyubur utama, dimana perempuan lebih leluasa untuk memainkan peran-peran yang lebih ideologis. Perempuan dianggap memiliki militansi tinggi dalam melakukan aksi teror. Apalagi dari sisi ketimpangan gender pada definisi jihad, membuat perempuan ekstremis mencari ruang ekspresi yang bisa meningkatkan “kesetaraan”. Alasan lainnya mengapa perempuan memilih melakukan jihad adalah karena para lelaki di kelompok mereka sibuk memikirkan syahwat (dengan melakukan poligami). Kondisi inilah yang membuat para perempuan merasa perlu untuk mempermalukan laki-laki dengan kemudian mengambil peran jihad itu.

Pola pendanaan kelompok radikal dan teroris mengalami perubahan yang signifikan. Ketika kelompok JI dipimpin oleh Parawijayanto, kotak amal merupakan salah satu strategi yang mereka gunakan dalam penggalangan dana. Potensi pendanaan Indonesia non Zakat Infaq Sodaqah saja lebih dari 400 juta dollar. Dengan kedok berdakwah atau berjuang dijalan Allah, gerakan kotak amal ini sulit dideteksi. Dibekukannya Aksi cepat Tanggap karena korupsi dana publik, dan dugaan penyaluran dana pada kelompok ekstrem, apakah bisa mematikan model-model penggalangan dana yang skupnya lebih kecil dan intensif? Bukankah rakyat Indonesia masih suka menyumbangkan ZIS di luar institusi resmi pengelola zakat. Sekalipun pemerintah sudah membuat berbagai regulasi terkait pendanaan terorisme dan melakukan upaya-upaya yang sangat signifikan, penggunaan kotak amal dan kegiatan kemanusiaan berpotensi besar dimanfaatkan untuk pendanaan aktivitas ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme.

1.2 Regulasi Pencegahan Penanganan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia

Setelah disahkannya Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang RAN PE, sejumlah peraturan untuk mendorong operasionalisasi Perpres dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu infrastruktur menjalankan strategi nasional. Berikut sejumlah kebijakan yang sangat menentukan:

- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE;
- Surat Keputusan Kepala BNPT (SKEP BNPT) Nomor 129 Tahun 2021 tentang Sekretariat Bersama RAN PE.
- SE Mendagri Kepada gubernur dan Bupati, untuk melaksanakan RAN PE di daerah (SE No. 339/5267/ SJ tanggal 29 September 2021).
- Permendagri No. 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022 - urusan daerah dibiayai daerah, kewenangan pemerintah pusat di daerah bisa dibiayai dengan APBN: (UU no. 23 / 2014 - pembiayaan APBN - dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus.

Ada dua hal penting yang diatur oleh pemerintah dalam menjalankan Perpres RAN PE yaitu; **Pertama**, penguatan tim koordinasi melalui skema Sekretariat Bersama, dimana tim pelaksana lintas kementerian dan lembaga dibentuk dan dikoordinasikan melalui mekanisme rapat koordinasi dan *joint-report*. Dalam wadah Sekretariat Bersama (Sekber), selain kementerian lembaga, masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Tematis, mulai meningkat kedisiplinan dalam melaporkan capaian per tiga bulanan, menganalisis *gap*, dan mengusulkan proposal baru perubahan dalam sejumlah pendekatan. Khususnya, dalam mekanisme rapat Pokja Tematis yang dihadiri sejumlah wakil dari pemerintah, diharapkan bisa menciptakan *exchange*.

Kehadiran Pokja Tematis sebagai mekanisme formal keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam tata kelola RAN PE, seharusnya bisa membuka ruang pertukaran lintas aktor yang lebih dinamis. Selain itu, masukan Pokja Tematis secara berkala dapat meningkatkan kualitas layanan dan program pemerintah.

Pendekatan rapat koordinasi menyeluruh *keempat* Pokja, dengan melakukan *update* dan analisis *gaps* implementasi RAN PE, seharusnya diambil oleh Sekber agar lebih bisa menyediakan ruang pertukaran lintas Pokja, sehingga secara organik membuka potensi kolaborasi.

Kedua, meskipun pembuatan RAD PE tidak menjadi mandat utama dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021, namun dukungan positif masyarakat sipil di sejumlah provinsi dengan membuka ruang diskusi mengapa penting bagi daerah memiliki RAD PE, telah berhasil mendorong 5 provinsi mengeluarkan rencana strategis daerah untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Kejelasan aturan daerah dan pembiayaan pelaksanaan RAD PE, serta mekanisme pelaporan, membantu daerah mewujudkan *the whole government and whole society approach* dalam implementasi RAD PE.

1.3 Mekanisme Sekber dan Dukungan pada OMS

Sekretariat Bersama (Sekber) merupakan manifestasi dari *political will* pemerintah dalam menjalankan RAN PE. Keberadaan Sekber RAN PE sebagai model tata kelola yang efektif dalam menggerakkan aktor negara dan non negara dipandang cukup efektif. Terutama dalam memaksa setiap kelompok kerja melakukan koordinasi internal dan mengevaluasi implementasi intervensi program.

Tantangan terbesar Sekber dalam menggawangi tata kelola pelaksana RAN PE adalah menjalankan *beyond "check list"*, tetapi secara substansial seharusnya menciptakan mekanisme yang bisa mendorong terwujudnya ruang-ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan serta kerjasama lintas aktor yang lebih intensif.

Sekber belum memiliki mekanisme dukungan yang jelas untuk memaksimalkan peran masyarakat sipil dalam mendorong perubahan substansial di bawah kerangka kerja RAN PE. Diharapkan dengan hadirnya Forum Kemitraan yang didorong oleh masyarakat sipil, Sekber bisa juga memainkan peran *"match maker"* dalam menciptakan kerjasama lintas aktor dan lintas pilar dalam RAN PE.

Untuk memaksimalkan peran OMS dalam pendampingan pada mantan napiter, deportan dan returni kembali ke masyarakat, Sekber seharusnya bisa menjadi jembatan atas kebuntuan masalah akses dan akurasi data. Ketertutupan dan ketidakkonsistenan data yang dimiliki oleh sejumlah institusi negara yang bertanggungjawab para deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi, menyebabkan upaya pendampingan di lapangan yang dilakukan oleh OMS, tidak maksimal. Di sinilah Sekber seharusnya bisa memainkan peran penting untuk menjembatani komunikasi antar aktor dalam hal akses pada data.

Sekber belum menggunakan kerangka kerja *women, peace and security* (WPS), yang dijalankan terpisah dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS), sebagai salah satu kontributor besar dalam menguatkan pencapaian di pilar 1 yaitu pencegahan, khususnya dalam pencegahan konflik dan upaya menghindarkan daerah konflik sebagai *home ground* para teroris. Sebagai negara yang menjalankan Resolusi Dewan Keamanan

PBB 1325, Indonesia memiliki peluang bagus untuk menyandingkan agenda PVE dalam kerangka WPS. Di sinilah seharusnya peran Sekber menggandeng Kementerian PPPA bisa terjadi dengan membuat mekanisme *alignment* yang konkrit antara RAN PE dengan RAN P3AKS.

Sekjen PBB telah menjadikan pencegahan konflik dan pemberdayaan perempuan sebagai dua pilar penting yang menjadi elemen utama dalam melakukan pencegahan ekstremisme kekerasan. Kerentanan daerah pasca konflik, seharusnya bisa mendorong sejumlah institusi di bawah Sekber untuk melakukan konsolidasi terpisah.

Sekber juga belum melihat kerangka besar pembangunan berkelanjutan melalui implementasi RAN SDGs sebagai potensi besar menjawab akar masalah dari ekstremisme kekerasan dan terorisme. Bukankah ketimpangan dan ketidakadilan menjadi dua faktor besar yang menyumbang pada radikalisme seseorang. Karenanya meletakkan kerangka SDGs dalam menjalankan RAN PE di masa mendatang, sangat memungkinkan dalam mendorong agenda jangka panjang pemulihan para mantan dan upaya pencegahan secara masif dari radikalisme dan ekstremisme.

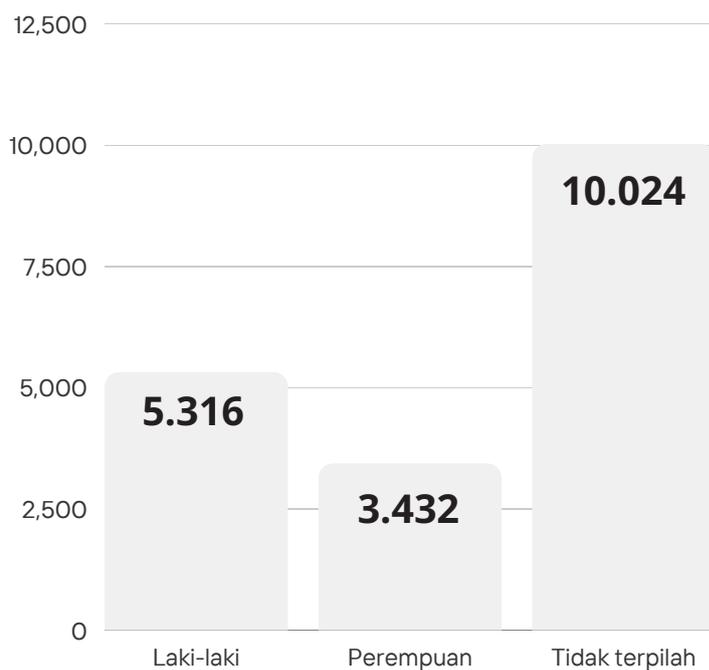
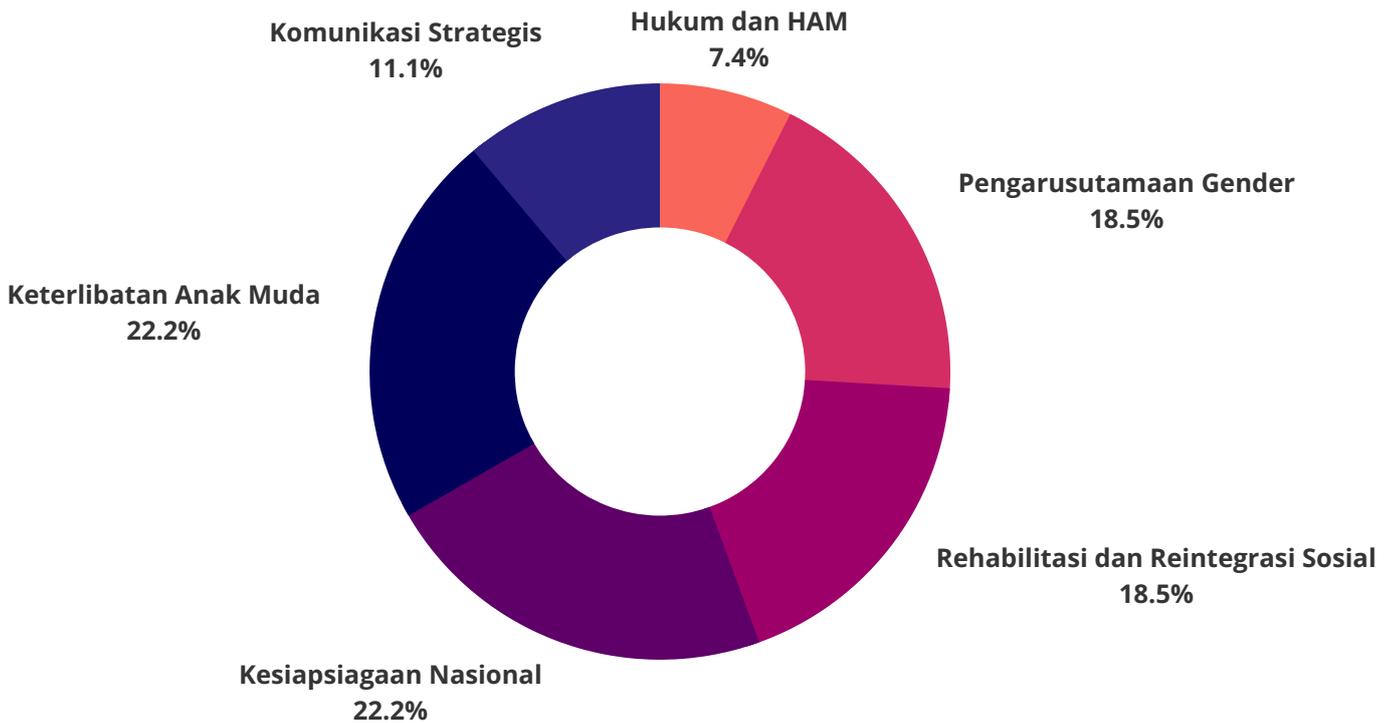
Bidang Pokja

25 CSO

Berpartisipasi dalam pelaporan

97

Kegiatan /Program



Perbandingan gender



7 penerima manfaat termasuk disabilitas

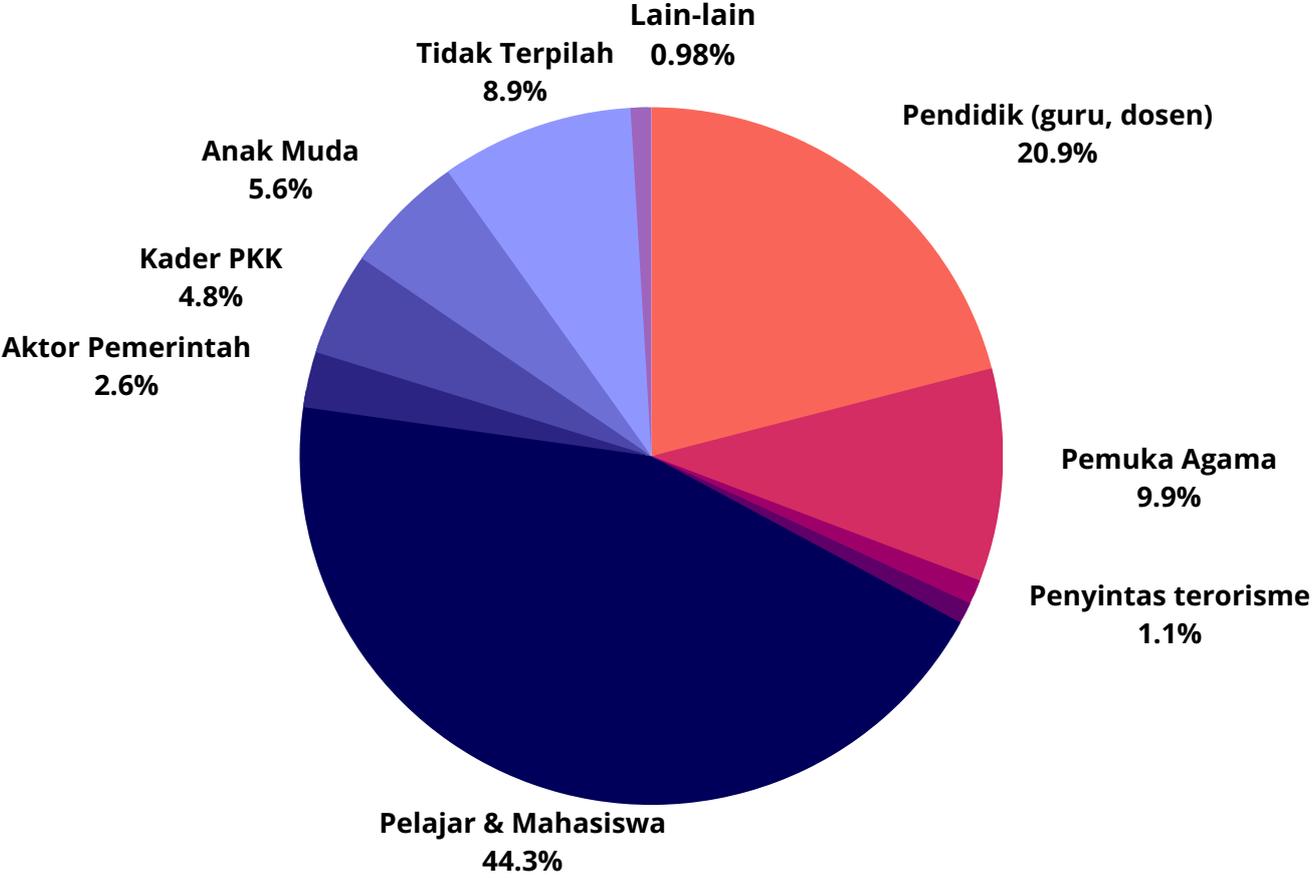


Jumlah data penerima manfaat dilaporkan

18.772

10.546

Jumlah aktor dilaporkan



Aktor yang diintervensi paling banyak selama 2022



Pelajar & Mahasiswa



Pendidik



Pemuka Agama

Aktor paling jarang diintervensi lain-lain, termasuk eks napiter

2.375 buah

**Total produk pengetahuan
sepanjang 2022**



Buku

8



Materi Khutbah

56



SOP/pedoman

6



Kebijakan

4



Modul

17



Learning game

2



Video & Film

141



Konten Digital

1.378



Virtual Exhibition

1



Produk tulisan

681



Podcast

76

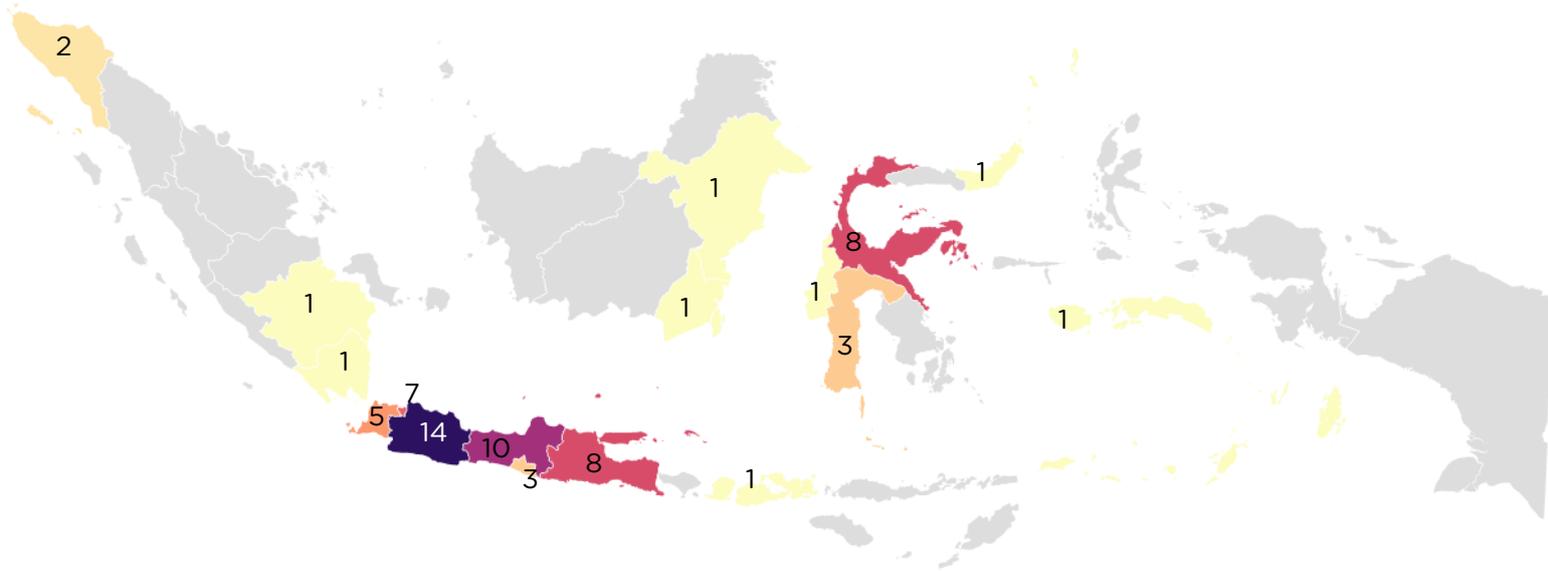


Publikasi riset

6

Sepanjang 2022, Pokja Tematis bekerja di

17 Provinsi



*Wilayah tanpa warna adalah wilayah yang tidak ditemukan menjadi sasaran program/intervensi dari data pelaporan

Organisasi masyarakat sipil yang bergabung di Pokja Tematis melakukan intervensi di 17 Provinsi di Indonesia, dengan jumlah program:

Jawa Barat	14	Maluku	1	Lampung	1
DKI Jakarta	7	Aceh	2	Kalimantan Selatan	1
Jawa Timur	8	Sulawesi Tengah	8	Banten	5
Jawa Tengah	10	Sulawesi Selatan	3	Sumatera Selatan	1
Yogyakarta	3	Sulawesi Barat	1	Kalimantan Timur	1
NTB	1	Sulawesi Utara	1		

2

Peran dan Fungsi OMS dalam Pelaksanaan RAN PE

Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam implementasi RAN PE semakin *visible* dengan hadirnya Pokja Tematis sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi OMS lintas bidang, sekaligus mengukuhkan hadirnya ruang sipil untuk memastikan aspirasi akar rumput dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan arah pengembangan program RAN PE.

2.1 Fungsi Koordinasi dan Konsolidasi

Ada dua wadah yang dikembangkan oleh masyarakat sipil Indonesia dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan terjadi secara efektif.

Pertama, melalui wadah Working Group on Women and PCVE (WGWC), sebuah jaringan nasional yang memiliki mandat memperkuat koordinasi lintas aktor dalam memastikan gender mainstreaming di kebijakan dan intervensi program. Kehadiran WGWC sejak tahun 2017 telah berhasil berinovasi dalam mempertebal indikator gender dalam kebijakan pemerintah nasional dan daerah. Hadirnya 5 RAD PE di Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan kontribusi besar WGWC dalam menggerakkan aktor-aktor daerah, mengkonsolidasi gerakan di daerah, dan membuka ruang kerjasama dengan pemerintah daerah, melalui dukungan BNPT.

WGWC tidak saja menjadi wadah OMS untuk memonitor implementasi PUG, tetapi juga berfungsi efektif sebagai wadah untuk membangun dan mengkonsolidasi pengalaman dan pengetahuan perempuan dan anak dalam konteks VE. K-Hub www.womenandcve.id yang digagas oleh WGWC, menjadi wadah koordinasi digital dalam hal pengetahuan lembaga mitra WGWC, sekaligus sebagai alat komunikasi dengan pihak internasional terkait perkembangan isu perempuan dan CVE di Indonesia. Khususnya menangkap untold and unheard stories dibalik keterlibatan perempuan dan anak dalam ekstremisme kekerasan.

Kedua, kehadiran Pokja Tematis, sebagai ruang keterlibatan OMS dengan aktor negara secara formal, merupakan upaya menjaga agar ruang demokratis tetap ada di Indonesia, khususnya balancing pendekatan keamanan yang masih kuat dalam kerja-kerja PVE. Kehadiran Pokja Tematis yang lebih memiliki keragaman latar belakang masyarakat

sipil, di satu sisi telah memberikan ruang pertukaran bagi masyarakat sipil sendiri, tetapi juga dapat menciptakan ruang baru untuk pertukaran informasi, pengalaman dan praktik baik antar aktor pemerintah dan non pemerintah.

2.2 Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif OMS dalam kerja-kerja implementasi RAN PE dilakukan dengan sejumlah pendekatan yaitu:

Pertama, konsultatif horisontal dengan semua mitra OMS yang tergabung dalam wadah koordinasi baik itu dalam WGWC maupun dalam Pokja Tematis. Ruang konsultatif ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan seperti pertemuan nasional secara *offline* maupun *online*, yang berfungsi mengkonsultasikan gagasan-gagasan baru maupun draf regulasi yang akan diadvokasi.

Ruang konsultasi antar OMS lebih bersifat sebagai ruang belajar yang egaliter, dimana para aktivis, akademisi, dan media alternatif secara terbuka membahas isu-isu terkini dan menganalisis *gap* dan tantangan baru dalam meluaskan isu.

Kedua, ruang konsultatif vertikal dengan pemerintah Indonesia, lebih dilakukan secara formal melalui jalur koordinasi Pokja Tematis dengan Sekber RAN PE. Koordinasi lintas Pokja (ada 3 Pokja Pemerintah dan 1 Pokja OMS), seharusnya bisa memaksimalkan perjumpaan antar aktor untuk menganalisis perkembangan terorisme, dan merumuskan langkah-langkah baru yang harus dilakukan oleh Pokja.

2.3 Fungsi Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi (Penilaian)

Cakupan fungsi pemantauan dan evaluasi tidak hanya di internal Pokja Tematis, tetapi juga di luar Pokja Tematis. Di internal Pokja Tematis, fungsi pemantauan seharusnya bisa optimal dalam mekanisme koordinasi bersama dimana empat Pokja memiliki kesempatan interaksi dan menganalisis capaian secara keseluruhan kerja Sekber. Dalam konteks ini, perspektif Pokja Tematis sangat dibutuhkan untuk memastikan negara menjalankan prinsip HAM dan PUG dalam seluruh intervensi program.

Fungsi monitoring berupa rapat tiga bulanan yang difasilitasi oleh Sekber RAN PE, telah memberikan kesempatan antar OMS untuk melakukan evaluasi sendiri, dan memberikan sejumlah rekomendasi. Sayangnya, belum maksimal dalam mendorong fungsi pemantauan OMS ke dalam Pokja Pemerintah. Padahal kalau terjadi, kemungkinan besar Sekber bisa mengurai stagnasi yang terjadi dalam intervensi pencegahan ekstremisme.

Pembuatan laporan tahunan yang digagas oleh Sekber juga dalam rangka menjalankan fungsi evaluasi OMS. Posisi OMS dalam Pokja Tematis, tidak boleh mematikan daya kritis OMS terhadap pelaksanaan kebijakan yang diampu oleh banyak aktor. Tetapi sebaliknya, akses pada pengambilan keputusan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh OMS untuk selalu memberikan masukan konstruktif pada negara agar semakin percaya diri dalam memperluas ruang sipil dan menjaga kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi.

Karenanya, laporan independen Pokja Tematis merupakan manifestasi status OMS yang mandiri. Laporan independen ini diharapkan bisa menjadi wadah OMS untuk lebih mengekspresikan pengalaman dan membagi praktik baik kepada publik, sebagai bagian komitmen akuntabilitas. Laporan independen juga ditujukan sebagai alat komunikasi Pokja Tematis dengan ketiga pokja lainnya, dalam mendorong kerja-kerja dengan pendekatan dampak, bukan berbasis pada kegiatan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi di atas, ada kebutuhan kemitraan antara aktor pemerintah dan pemerintah untuk memperkuat sinergi gagasan, strategi dan sumber daya, untuk memaksimalkan impact. Maka Pokja tematis bisa bekerjasama dengan Forum Kemitraan untuk mendorong model-model kerjasama lintas pilar.

Pola kerjasama lintas pilar akan membawa dinamika tersendiri dalam pelaksanaan RAN/D PE, dan membawa hasil yang maksimal.

Perkembangan RAN PE dan Intervensi Masyarakat Sipil

3.1 Bidang Pengarusutamaan Gender

Persoalan ketimpangan gender yang paling mendasar dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan di tahun 2022 adalah masih belum diletakkannya analisa gender dalam merancang kebijakan dan program. Ini terlihat dari masih sedikitnya pelibatan aktif perempuan di tingkat perencanaan dan desain program-program seperti dalam kampanye pencegahan, deradikalisasi maupun reintegrasi sosial. Perempuan lebih banyak menduduki porsi sebagai peserta program. Untuk penerima manfaat dari kebijakan, seperti reintegrasi sosial, perempuan juga masih ada di posisi sedikit. Perempuan juga masih menjadi sekedar angka statistik dalam berbagai kegiatan namun penggalian mengenai pemikiran, pengalaman dan perasaan mereka terkait dengan ekstremisme kekerasan masih jarang dilakukan.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) oleh OMS dilakukan dalam 4 ranah: memastikan PUG dalam penyusunan RAD PE, memastikan inklusi perempuan dalam penyusunan RAD PE, peningkatan kapasitas pemerintah dan OMS lokal untuk memahami konsep WPS dan PVE, dan penguatan agensi perempuan. Proses pelokalan RAN PE ke dalam regulasi dan RAD PE yang diinisiasi WGWC, bersama OMS seperti Percik Institute, AMAN, YPP, Institut Perempuan, Balai Syura, Yayasan Empatiku, Fatayat NU Jawa Timur, Libu Perempuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mengapa pengarusutamaan gender diperlukan ke dalam peraturan daerah, dan bagaimana melibatkan OMS lokal dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi peraturan daerah. Prinsip PUG secara eksplisit terintegrasi dalam regulasi dan program Rencana Aksi Daerah.

Untuk memastikan rencana implementasi RAD PE yang sensitif gender, WGWC bekerjasama dengan INFID dan AMAN memfasilitasi forum konsolidasi nasional bersama pimpinan Kesbangpol provinsi dan OMS. Penguatan kapasitas aktor kunci daerah dilakukan oleh AMAN untuk memperkuat lensa *women, peace and security* (WPS) dalam membaca kerentanan dan pola konflik baru dan pemetaan keterlibatan perempuan dan anak dalam ekstremisme. LIGS UMJ mengadakan webinar tentang Perempuan dan

PVE (studi di Bangladesh dan India) dan memetakan peran ulama perempuan dalam pencegahan dan penanganan VE melalui riset tentang KUPI. Penguatan perspektif gender dalam wacana PCVE juga ditempuh masyarakat sipil untuk memberikan narasi alternatif sekaligus melawan balik narasi bias dan mendiskreditkan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. WGWC melalui platform K-Hub (<https://womenandcve.id/>) turut memperkuat kontra narasi radikalisme dengan mempopulerkan narasi keadilan gender. AMAN menggandeng KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) untuk menyusun buku saku “Perempuan dan Ekstremisme Kekerasan dalam Perspektif Islam” yang menjadi salah satu referensi bagi perumusan Fatwa KUPI terkait perlindungan perempuan dari bahaya ekstremisme kekerasan.

Pembentukan forum untuk istri mantan napiter, deportan dan returni yang diinisiasi DASPR bersama WGWC juga menjadi salah satu *breakthrough* membuka peluang perempuan menjalankan agensinya dalam P/CVE, selain memperkuat *skill* kepemimpinan perempuan istri mantan napiter untuk bertransformasi menjadi *peacebuilders*. Serve Indonesia mengintervensi organisasi perempuan di tingkat komunitas, seperti PKK, untuk ikut menjalankan peran aktif mereka dalam pencegahan dan deteksi dini ekstremisme. Program Desa Damai yang diinisiasi Wahid Foundation juga memperkuat partisipasi perempuan akar rumput dalam membangun resiliensi komunitas untuk pencegahan radikalisme. Melalui Forum Daiyah (Fordaf), Fatayat NU terus melakukan penguatan Daiyah anti Radikalisme untuk mengkontra-narasi radikal yang berkembang di kelompok keagamaan, terutama menysasar perempuan.



Community Devt mahasiswa UMJ dengan mahasiswa dari dua universitas India di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan



Forum Nasional Penyiapan Daerah Memastikan PUG dalam implementasi RAD PE di Jakarta, 5-6 Oktober 2022 difasilitasi oleh WGWC, Infid dan AMAN Indonesia



Konferensi Internasional Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Semarang 23 November 2022 diselenggarakan UIN Walisongo dan AMAN Indonesia



Penguatan Daiyah Anti Radikalisme PP Fatayat NU



Cover Buku Perempuan dan Ekstremisme Kekerasan dalam Perspektif Islam yang dihasilkan dari Halaqah pra-KUPI oleh AMAN Indonesia



Penguatan Daiyah Anti Radikalisme PP Fatayat NU



Workshop peningkatan Kapasitas Kader PKK sebagai Garda Terdepan menjaga Lingkungan Nyaman, Damai, dan Sejahtera oleh Serve Indonesia, di Surabaya 13-14 Desember 2022

3.2 Bidang Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak-Hak Korban

Pemenuhan hak korban terorisme merupakan elemen penting dalam upaya melawan ekstremisme dan terorisme. Upaya ini bersandar pada ragam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Upaya pemenuhan hak korban secara eksplisit didukung Pilar Kedua Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE yang fokus pada perlindungan saksi dan korban. Noun dalam

implementasinya, masih banyak ditemukan kendala bagi korban untuk mengakses restitusi atau pendampingan yang disebabkan ketiadaan dokumen seperti KTP, rekam medis dsb.

Elemen perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban turut menjadi agenda OMS dalam pelokalan RAN PE ke dalam regulasi daerah dan RAD PE. Di konteks Sulawesi Tengah misalnya, Libu Perempuan berhasil meyakinkan pemerintah daerah untuk membangun ruang aman bagi pelapor dan korban terorisme, serta memperkuat mekanisme pemberian bantuan terutama layanan psikososial berbasis pengalaman respons kasus Lembantonga, Sigi (2020). Institut Perempuan (Jawa Barat) dan Percik Jawa Tengah mengawal program Pemberian akses keadilan pada korban terorisme, dengan dukungan layanan konseling peka gender, dan pemulihan jangka panjang terakomodir dalam RAD PE masing-masing. Dengan disahkannya RAD PE, akan semakin memperkuat kerangka legislasi dan membuka peluang implementasi pencegahan, perlindungan saksi dan korban secara komprehensif dan sensitif gender.

Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas juga menjadi agenda utama daerah yang berhasil didorong melalui RAD PE. YKP tengah memulai membangun perencanaan untuk pembentukan koperasi bagi wadah usaha para penyintas di Jabodetabek, Cirebon, Surabaya, Bali, dan Poso. Koperasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemenuhan hak atas kemandirian ekonomi bagi penyintas dan keluarganya, tentunya dengan dukungan multipihak, baik pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, dan pihak swasta. Selain itu, YKP juga melakukan pendampingan layanan psikososial bagi penyintas anggota Polri dalam pemenuhan hak-hak korban berupa penghargaan dari instansi kepolisian.

Pengembangan skema rekonsiliatif antara korban dan pelaku untuk mendukung upaya PE juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Yayasan Forum Komunikasi Aktifis Akhlakulkarimah Indonesia (FKAAI) banyak memberikan kesempatan bagi mantan napiter untuk memberikan pelayanan kepada korban aksi terorisme sebagai usaha rekonsiliasi, selain berdialog dan permintaan maaf. Mereka juga menyelenggarakan Peringatan Tragedi Bom yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya aksi Terorisme dan ekstremisme serta membangun empati dengan korban aksi terorisme. Yayasan Keluarga Penyintas memfasilitasi kunjungan dan dialog antara penyintas dengan napiter di sejumlah Lapas seperti Gunung Sindur Bogor, Cipinang, Salemba, Cilaca, Porong, dan Malang. Ke depan, penguatan kelembagaan komunitas korban atau penyintas sangat diperlukan, juga upaya memperbanyak akses terhadap sumberdaya untuk mendukung kerja-kerja mereka yang berkelanjutan.



Koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk Penetapan Pergub RAD PE yang salah satunya membahas perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban, difasilitasi LIBU Perempuan



Peringatan tragedi bom oleh FKAAI-foto berita Republika

3.3 Bidang Keterlibatan Pemuda

Faktor pendorong keterlibatan pemuda dalam radikalisme secara umum dapat dilihat dari aspek emosional psikologis (pencarian makna dan identitas, mencari tantangan, mencari balas dendam, dan mencari status sosial) dari diri pemuda dimana ia menganggap berafiliasi dengan kelompok ekstremis salah satu cara untuk mencapai keinginan mereka. Kondisi sosial eksternal seperti lingkungan keluarga, pertemanan, institusi pendidikan hingga media sosial juga turut berkontribusi sebagai penarik bagi pemuda bersinggungan dengan ekstremisme kekerasan. Kondisi internal pemuda yang minim daya kritis mudah ditarik oleh pola-pola rekrutmen dan pintu masuk ideologi ekstremis, mulai dari doktrin agama, beasiswa, *game*, hingga bantuan cepat tanggap ketika terjadi bencana.¹

Di sisi lain, pemuda adalah aktor kunci dan kredibel melakukan perubahan untuk mencegah radikalisme di lingkungan mereka, ekosistem pendidikan dan komunitas melalui sejumlah strategi intervensi. **Pertama**, membangun ruang-ruang perjumpaan dan dialog dengan kelompok anak muda yang beragam sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, mengasah daya kritis, media untuk mengonfirmasi informasi yang didapatkan hingga membangun kolaborasi. Peace Leader Indonesia membuka ruang-ruang perjumpaan dengan kelompok pemuda lintas iman, suku, budaya dan komunitas melalui Ngopeace (Ngobrol perdamaian) di kafe-kafe lokal, Kemah kebangsaan (live in); dan Peace-service, sebuah kegiatan perjumpaan dibalut dengan kerja bakti membersihkan rumah ibadah sembari melakukan dialog damai untuk menggali narasi-narasi damai yang bersumber dari kitab suci dan praktek keagamaan. Peace Generation membangun ruang perjumpaan mempertemukan sekolah-sekolah dengan identitas berbeda melalui *Breaking Down the Wall*. Girls Ambassador for Peace (GA4P)

¹ Dielaborasi dari hasil diskusi kelompok bidang pemuda dan Policy Brief “Memperkuat Partisipasi Bermakna Pemuda untuk perdamaian dan Keamanan: peran Pemuda dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang dikeluarkan oleh AMAN Indonesia

menyediakan ruang perjumpaan melalui *Girls Talk*, mempertemukan perempuan muda untuk berbagai pengalaman khususnya termasuk bersinggungan dengan intoleransi. INFID bekerjasama dengan Gusdurian mengundang pemuda merasakan pengalaman keberagaman serta bagaimana mengelolanya, meningkatkan eksposur rumah ibadah kelompok minoritas melalui Youth Camp “Muda Toleran”.

Kedua, meningkatkan pemahaman daya kritis melalui lokatitih, lokakarya dan pengembangan kapasitas dengan menggunakan media kreatif (seperti board game, seni dan musik). PeaceGeneration melakukan intervensi pada penguatan keterampilan sosio-emosional, mencakup berpikir kritis, empati dan kolaborasi, dan pemecahan masalah berbasis kreatif melalui Frosh Project ID. Peace Leader Indonesia secara aktif meningkatkan kapasitas pemuda terkait mengelola keberagaman dan pendidikan perdamaian yang diintegrasikan dengan Implementasi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) di sekolah dan menyorot pada perubahan atas tiga dosa besar pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual berbasis gender melalui Peace Goes to School/Campus. Maarif Institute memperkuat kapasitas pemuda usia pelajar terkait nilai-nilai toleransi, inklusivisme, dan kebhinekaan serta mengarusutamakan nilai kebangsaan yang moderat, toleran dan inklusif melalui Jambore Pelajar Teladan Bangsa.

Ketiga, melakukan kontra narasi dan kampanye peningkatan kesadaran terkait isu ekstremisme berbasis kekerasan melalui media sosial. INFID melakukan dialog intergenerasi via live instagram, mengundang influencer dan pemuda yang memiliki pengalaman langsung dalam upaya perdamaian. Keempat memperkuat organisasi dan gerakan anak muda untuk penguatan partisipasi bermakna anak muda dalam PCVE. Youth Forum on Peace and Security diinisiasi oleh AMAN Indonesia bersama sejumlah komunitas anak muda seperti KAMI DAMAI, Peace Leader Indonesia, Girl Ambassador for Peace untuk membangun peta jalan advokasi mengintegrasikan agenda youth, peace and security dalam implementasi RAN PE. Forum melahirkan policy brief “Memperkuat Partisipasi Bermakna Pemuda untuk Perdamaian dan Keamanan: Peran Pemuda dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)” yang kemudian diserahkan kepada BNPT.



Bermain board game perundangan_BDW Day_13 Januari 2022. (Peace Generation)



Modul Nusantara_September 2022_Univ Negeri Jakarta (Peace Generation)



Diskusi dan Serah Terima Policy Brief Partisipasi Bermakna Anak Muda dalam PVE Kami Damai kepada Deputy III BNPT pada 8 Agustus 2022)



Girls Talk, program reguler untuk peningkatan pengetahuan tentang KBGO, pencegahan kekerasan seksual, dan menyuarakan agenda perdamaian dan keamanan oleh GA4P



Jambore Pelajar Teladan Bangsa digelar di Asrama Haji Pondok Gede 27-30 Desember 2022 oleh Maarif Institute



Kemah Bebangaan oleh Peace Leader 18 September 2022



Online Board game_media untuk program mentoring mahasiswa (Peace Generation)



Peace Goes to School-Peace Leader di SMP Widya Wiyata Sidoarjo pada 5 Oktober 2022



Peace Service Bersih-Bersih Rumah Ibadah dan Dialog Lintas Iman oleh Peace Leader di TTID Pay Pien San Jember 06 November 2022



Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan di UMS Solo pada 13-17 November 2022 oleh Maarif Institute



Seminar _Indonesia Rumah Bersama Gusdurian di UIN Jakarta



Youth Camp Muda Toleran" diselenggarakan pada 1-4 September 2022 di Yogyakarta oleh INFID digelar oleh Infid pada 1-4 september 2022

3.4 Bidang Komunikasi Strategis ;

Narasi atau propaganda ekstremisme di media digital masih terjadi, meskipun jumlah aksi-aksi ekstremisme dan terorisme mulai menurun. Setidaknya ada 4 narasi ekstremisme yang masih eksis dan berpengaruh; yaitu narasi jihad atau perang karena Islam terzalimi; narasi takfiri dengan mengafirkan sesama Muslim yang berbeda pandangan atau mazhab; narasi thaghut pada kepemimpinan negara demokrasi; dan narasi *al wala wal barra* (loyalitas terhadap agama dan pelepasan diri dari orang kafir) yang menegaskan identitas nonmuslim. Narasi di atas digunakan pelaku pengeboman Polsek Astana Anyar Kota Bandung (7/12/23) untuk memberi pesan teror yang tertulis pada motor yang dipakai saat aksi "KUHP adalah Hukum Syirik dan Kafir, Perangi Para Penegak Hukum Setan". Narasi lain yang juga unik dan perlu menjadi perhatian adalah "sedekah sebagai tiket surga" yang juga digunakan bukan hanya untuk mengampanyekan pemahaman kelompok ekstremis, namun juga digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Perubahan algoritma media sosial yang mengarahkan seseorang untuk berkumpul dengan kelompok yang memiliki pemahaman yang sama, membuat sejumlah OMS dan media melakukan restrategi dalam komunikasi untuk PCVE. **Pertama**, memperkuat

narasi yang mengkampanyekan nilai perdamaian dan toleransi atau lebih bersifat mencegah seseorang terpapar paham ekstremis. EL-Bukhari Institute aktif memproduksi konten berupa tulisan, infografis, video dan podcast berkaitan dengan isu kebangsaan, pluralisme dan kontra radikalisme. Sementara Ruangobrol.id atau Kreasi Prasasti Perdamaian menyusun buku “Narasi mematikan Pendanaan Teror di Indonesia” dan short film series dari hasil penelitian tentang pendanaan terorisme di Indonesia. Jaringan Gusdurian menyebarkan narasi keislaman, keindonesiaan dan kebangsamaan yang selaras dengan nilai kemajemukan, perdamaian dan toleransi bertajuk “Indonesia Rumah Bersama”. IMCC secara rutin memproduksi Podcast untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas (netizen) tentang bahayanya paham radikalisme dan ekstrimisme, termasuk dengan menghadirkan para mantan narapidana. PAKAR (Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi) menyajikan laporan dan analisis khusus terkait isu radikalisme dan terorisme di Indonesia. Selain itu juga melalui website mereka secara rutin menyebarkan berita terkini mengenai radikalisme di Indonesia.

Strategi komunikasi **kedua** adalah mendukung dan memperkuat jaringan kontributor, penulis dan *key opinion leader*, dan membangun sindikasi dalam menyebarkan narasi. El-Bukhari Institute melakukan seleksi dan inkubasi pada *key opinion leaders* atau *influencer* perdamaian, serta simposium moderasi beragama. AMAN Indonesia sejak 2020 membangun *supporting system* untuk jaringan penulis muda perempuan (Puan Menulis) untuk membangun otoritas pengetahuan dengan memproduksi tulisan populer yang bertujuan meningkatkan keseimbangan narasi di internet mengenai narasi alternatif dan kontra narasi perempuan dan ekstremisme. Hal yang sama dilakukan Jaringan Gusdurian dengan memperkuat pemuda penggerak komunitas dalam menyebarkan narasi

Strategi **ketiga**, mengelola *platform* pusat pengetahuan/ *Knowledge-Hub* sebagai ruang pertemuan dan pertukaran pengetahuan bagi inisiatif masyarakat sipil dan praktisi dalam P/CVE. Kehadiran K-Hub membantu pendokumentasian praktik-praktik baik dan produk pengetahuan PCVE sebagai basis pengambilan keputusan. PeaceGeneration mengelola K-Hub for PCVE Community, merupakan *platform* layanan digital yang digunakan oleh inisiatif PCVE untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan saling berbagi produk pengetahuan PCVE di Indonesia. AMAN Indonesia bersama dengan WGWC mengelola platform K-HUB WGWC yang secara khusus mengonsolidasi pengetahuan tentang kerja-kerja perempuan dan PCVE di Indonesia.

Keempat, memperkuat keterlibatan organisasi keagamaan untuk memperkuat kontra narasi. CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Workshop Peran Pesantren dalam Mempromosikan Perdamaian melalui Kontra Narasi Ekstremis [KNE] di sejumlah kota, dan rangkaian training Penguatan Kontra Narasi Ekstremis untuk Guru Pesantren dan Ulama Muda. Selain itu, untuk memperkuat kapasitas khatib, CSRC juga menyediakan

buku Khutbah dan Podcast Kontra Narasi Ekstremis. Sejak 2018 hingga saat ini, INFID melakukan *media campaign* promosi toleransi dan perdamaian dengan berkolaborasi dengan media-media keislaman seperti NU Online, Islami.co, Arrahim.id, dan IBTimes.



Podcast Maarif Institute



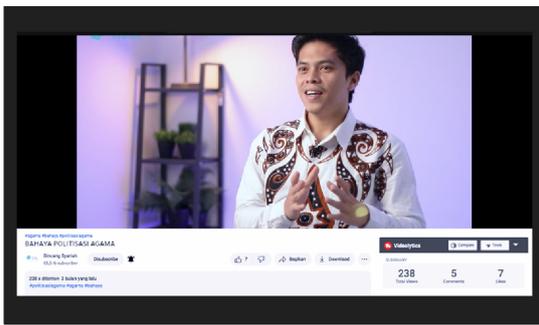
Podcast SOFYAN TSAURI_ BAGAIMANA SAYA TERPAPAR PAHAM EKSTREMISME, INTOLERAN DULU TERORIS KEMUDIAN diproduksi IMCC



Training Narasi Positif Pekerja Sosial Perempuan pada 16-17 Nov 2022 oleh ruangobrol



Workshop KNE CSRC di Makassar 8-10 Juni 2022



Muhammad Hidayatullah, salah seorang talenta dari kegiatan Key Opinion Leader. Kegiatan berhasil menjangkau 5 peserta terbaik yang didukung untuk membuat konten perdamaian di tahun 2022. Dokumentasi El Bukhari



Kampanye Media Sosial _Indonesia Rumah Bersama Gusdurian



FGD Outlook K-Hub_Mei 2022_Jakarta_Praktisi PCVE (Peace Generation)



K-Hub Fellowship_Februari 2022_Jakarta_Praktisi PCVE (Peace Generation)



Kelas Menulis Kreatif untuk Perdamaian INFID



Online Media Campaign- Promoting Tolerance, Democracy, and Peace INFID

3.5 Bidang Kesiapsiagaan Nasional

Aksi peledakan bom bunuh diri di Astana Anyar pada akhir 2022 menunjukkan bahwa kelompok ekstremis masih eksis dan memiliki kekuatan untuk melakukan aksi *amaliyah* bom bunuh diri. Namun, gejala ini tidak serta merta memantik kesadaran kritis masyarakat terkait ancaman radikalisme dan ekstremisme yang nyata. Banyak elemen masyarakat yang bersikap permisif terhadap situasi yang mengancam kerukunan dan keamanan bangsa. Ditambah lagi mereka masih kebingungan dengan konsep intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme sehingga berdampak pada respons masyarakat masih belum efektif.

Dalam merespons hal tersebut, upaya pencegahan oleh OMS dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui berbagai strategi. **Pertama**, penguatan *leadership* dan organisasi perempuan. Penguatan yang secara khusus menyasar organisasi perempuan merupakan bentuk *affirmative action* bagi perempuan untuk memaksimalkan mereka dalam melakukan transformasi di masyarakat dan berkontribusi pada ketahanan masyarakat. WGWC dan DASPR mendukung pengorganisasian istri mantan napiter melalui Pembentukan Fospeta (Forum Support Perempuan Tangguh).

Forum ini difungsikan untuk memperkuat kapasitas dan leadership para istri, untuk memperkuat daya tawar atau *bargaining position* dalam menangkap peluang kolaborasi dengan lintas aktor, mulai dari individu, keluarga hingga komunitas. Penguatan *leadership* perempuan juga dilakukan oleh AMAN Indonesia melalui program Sekolah Perempuan yang secara khusus menjadi inkubator kepemimpinan perempuan lintas iman dan akar rumput untuk memperkuat resiliensi dari konflik dan kekerasan.

Kedua, pengembangan riset-riset untuk membangun kesiapsiagaan dengan mengeksplorasi peta kerentanan baru dan potensi penanganannya. Tahun 2022, PPIM UIN Jakarta melakukan survei nasional dengan topik agama, pandemi dan anak muda untuk melihat pandangan anak muda terkait khilafah dan demokrasi. Riset lainnya yang senada juga dikeluarkan oleh INFID, tentang Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama. Peace Generation menyajikan riset Mapping Peran OMS dalam Implementasi RAN PE.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat, melalui program pendidikan perdamaian, sosialisasi mengenai bahaya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Wahid Foundation mereplikasi program Desa Damai sejak 2017 untuk membangun resiliensi komunitas perempuan di akar rumput melalui penanaman kohesi sosial, ketahanan masyarakat, serta mempromosikan kesetaraan masyarakat dan menghormati keragaman. Di komunitas Sekolah, Wahid Foundation launching “Sekolah Damai” sebuah inisiatif memperkuat elemen PVE dalam pembelajaran sekolah. PP Fatayat NU mengembangkan Halaqoh Moderasi Beragama untuk Dai, Daiyah, pelajar, guru, ormas, Majelis Taklim, pimpinan pesantren dll dalam rangka menangkal paham radikal yang berkembang. SeRVE (Society Against Radicalism & Violent Extremism Indonesia) memfasilitasi penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai sebagai agen terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai dan sejahtera. Untuk memperkuat sistem deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat, C-Save mendampingi sejumlah kelurahan/desa melalui program Deteksi Dini Ekstremisme Kekerasan (SITI) yang telah dikembangkan sejak 2019. Sementara PPIM UIN Jakarta memperkuat kesadaran kritis anak muda tentang bahaya intoleransi dan radikalisme melalui Festival CONVEY Day: “To Learn Toleran”.



Festival CONVEY Day- "To Learn Toleran" 12 Maret 2022



Halaqah Moderasi Beragama-PP Fatayat NU



Launching Hasil Survey Nasional PPIM UIN Jakarta 5 Januari 2022



Konsolidasi dengan tim SITI perwakilan Banten di Tangerang, 2 Juni 2022 (C-SAVE)



Program Sekolah Damai Wahid Foundation untuk penguatan partisipasi perempuan desa dalam menangkal radikalisme



Program Sekolah Perempuan AMAN Indonesia untuk Penguatan Leadership Perempuan dalam mencegah konflik kekerasan



Program Sekolah Damai Wahid Foundation untuk penguatan partisipasi perempuan desa dalam menangkal radikalisme



Program Sekolah Damai Wahid Foundation untuk penguatan partisipasi perempuan desa dalam menangkal radikalisme

3.6 Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial para mantan narapidana kasus terorisme (napiter) maupun deportan atau returni (selanjutnya disebut 'klien') masih menjadi tantangan serius ketika level penerimaan dan kesiapan masyarakat masih rendah menyikapi pengembalian klien ke masyarakat. Intervensi saat ini lebih banyak difokuskan pada penyiapan 'klien' daripada membangun kesiapan dan resiliensi masyarakat. Maka dapat dipahami jika masyarakat masih memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang menganggap kelompok klien tersebut sebagai ancaman terhadap komunitasnya.

Penguatan resiliensi sudah seharusnya berbasis pada klien dan masyarakat mengingat keduanya adalah *credible voices*. Melalui pendekatan *restorative practice* dan *reflective structured dialogue*, Yayasan Empatiku bersama WGWC membangun komunitas yang tangguh di mana warga lokal dan klien bersama-sama mendorong terbentuknya identitas klien yang lebih terbuka, positif, dan kooperatif, serta bersama-sama mencegah radikalisme baru atau radikalisme kembali para klien. Penerimaan sosial melalui pendekatan dialog, tidak saja membuka ruang rekonsiliasi warga dan klien, tapi keterlibatan banyak pihak mendukung tumbuhnya *ownership* pada program dan proses.

Stigma yang melekat pada mantan napiter juga menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses reintegrasi. Salah satunya stigma bahwa mereka merupakan orang-orang yang anti-sosial. Menyikapi hal tersebut Yayasan FKAAI mengajak mantan napiter untuk lebih pro-aktif dengan melakukan kegiatan yang sifatnya pelayanan dan amal yang tertuju langsung manfaatnya untuk warga sekitar seperti melalui bakti sosial dan bantuan sosial. Organisasi seperti INFID dan Yayasan Empatiku telah melakukan kajian atau assesment untuk pemetaan kebutuhan deportan dan returni dalam reintegrasi sosial.

Organisasi Masyarakat Sipil juga aktif memperkuat regulasi dan panduan bekerja dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan berbagai bentuk pendekatan. DASPR melakukan pendampingan penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pendampingan napiter perempuan dan anak. WGWC dan Rahima menerbitkan buku saku "Kontra Narasi Ekstremisme Berkekerasan" untuk mendukung deradikalisasi di dalam penjara, terutama merevisi kesalahpahaman ideologi teroris. Sementara YPP berkontribusi pada penyusunan Standar dan Modul untuk Penanganan napiter perempuan dan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu YPP juga menyiapkan Modul Pelatihan Reintegrasi Deportan dan Returnis di Indonesia.



Tm Tangguh Reintegrasi (Yayasan Empatiku) (Peace Generation)



Forum Internal Review standar penanganan napiter perempuan di LPP (YPP)



Foto Circle Dialogue antara aparat pemerintah dan penegak hukum tentang reintegrasi deportan dan returni di Depok oleh Yayasan Empatiku



Konsinyering modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme di Balai Pemasyarakatan (YPP)



Koordinasi fasilitator dan tim tangguh kelurahan Mekarjaya Depok pada 21 Januari 2022 untuk program reintegrasi

3.7 Bidang Hukum dan HAM

Sejak RAN PE disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) secara berjangkian membantu pemerintah dalam memperkuat legislasi dengan melokalkan RAN PE di tingkat daerah. Dokumen Perpres dan RAN PE tersebut tidak secara langsung memberikan mandat terhadap daerah maupun memberikan panduan untuk menyusun rencana Aksi Daerah. maka dapat dipahami jika daerah merasa tidak berkewajiban dan tidak perlu menurunkan RAN PE ke dalam regulasi maupun rencana strategis. Dalam situasi seperti ini, OMS berhasil meyakinkan pemerintah daerah bahwa dengan memiliki RAD PE, daerah memiliki rencana aksi yang terintegrasi, sehingga mampu menjawab kerentanan ekstremisme kekerasan, dengan mengkonsolidasi sumber daya dan kekuatan program baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Terkhusus, daerah bisa melakukan pencegahan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. Di level nasional, BNPT dan Kemendagri berhasil mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mendukung pelokalan RAN PE di daerah, termasuk menyiapkan alokasi budget dan pelaporan.

Di daerah, platform gerakan WGWC, dengan kepemimpinan perempuan yang resilien, telah berhasil mendorong dan memastikan pemerintah daerah mengeluarkan regulasi daerah terkait dengan penanganan ekstremisme kekerasan. Gubernur telah menandatangani RAD PE dan berkomitmen menjalankan RAD sebagai kerangka kerja terintegrasi dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme. Sejumlah mitra OMS seperti Libu Perempuan Sulawesi Tengah, Institut Perempuan Bandung, Percik Salatiga, Fatayat NU Jawa Timur, Balai Syura Aceh, Yayasan Empatiku, PSG Universitas Airlangga, AMAN Indonesia, Lappan Maluku, dan La Rimpu Nusa Tenggara Barat menjadi pengawal utama pembentukan dan pengesahan RAD PE di provinsi masing-masing. Saat ini 5 Provinsi (Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) telah memiliki regulasi dan rencana aksi untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang didorong oleh OMS. YPP bersama sejumlah mitranya juga telah mendorong lahirnya regulasi di kota Surakarta untuk terkait penanganan dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Upaya mendorong hadirnya RAD dibarengi dengan upaya penguatan sensitivitas gender ke dalam regulasi daerah, serta memastikan keterlibatan OMS secara eksplisit terjadi.

Peran OMS sangat sentral dalam kemajuan ini, dengan menjadi bagian dari inisiator, perumus, termasuk kemudian menjadi bagian dari tim kelompok kerja atau tim terpadu untuk implementasi RAD PE. Di nasional, WGWC memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Tematis dalam Sekretariat Bersama RAN PE yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala BNPT No. 299 tahun 2022. Pokja Tematis mewadahi 36 CSO yang memiliki konsen dan pengalaman kerja terkait PCVE. Wahid Foundation memperkuat upaya kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil melalui pembentukan Forum Kemitraan Nasional antara pemerintah dan pemangku Kepentingan di masyarakat terkait RAN PE. Forum multi stakeholders di Jawa Barat dan Jawa Timur yang difasilitasi INFID

menginisiasi keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang lebih holistik. Salah satunya mendorong regulasi/payung hukum mengenai Raperban Deradikalisasi Reintegrasi bagi Orang atau Kelompok Terpapar. Infid juga menyusun background paper mengenai Urgensi Payung Hukum bagi Penanganan Deportasi dan Returni memberikan dampak yang luas dalam hal penanganan mantan narapidana dan orang/kelompok orang terpapar terutama dalam proses reintegrasi sosial ke masyarakat.

Dalam konteks P/CVE, keluwesan OMS untuk berdialog dengan negara dan mantan teroris beserta keluarganya bisa menjembatani aspirasi-aspirasi dari kedua belah pihak. Dalam proses penegakan hukum dan HAM, OMS memiliki peran untuk mengontrol penggunaan kekuasaan oleh aparaturnegara dalam menangani kasus-kasus ekstrimisme yang mengarah pada terorisme. Hal ini menyebabkan penegakan hukum dan HAM terkait PVE di Indonesia memiliki kesan yang humanis jika dibandingkan dengan negarainegara lain yang dalam penanganan terorisme lebih sering menggunakan mekanisme extra yudisial.

Untuk mendukung laporan berkala tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, PT Kreasi Perdamaian/ruang obrol melakukan penelitian tentang pendanaan terorisme di Indonesia yang disajikan dalam bentuk buku "Narasi Mematikan Pendanaan Teror di Indonesia dan tersedia dalam 4 seri film pendek. Penelitian terkait dampak kebijakan penanganan terorisme terhadap hak sipil organisasi masyarakat sipil Indonesia juga telah disumbangkan oleh Yayasan Empatiku.

Peran OMS juga dapat terlihat dalam mengawal implementasi pemenuhan hak korban terorisme yang bersandar peraturan perundangan seperti Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres No.7 Tahun 2022 tentang RAN PE. Advokasi OMS lebih mendorong agar peraturan-peraturan yang ada tidak menghalangi para korban untuk memperoleh hak kompensasi dan pendampingan psikososial.

List Produk hukum:

1. Keputusan Kepala BNPT No.299 tahun 2022 tentang pembentukan Pokja tematis
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, beserta lampiran RAD PE.
3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300/725/2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Aceh.

4. Keputusan Gubernur Nomor 188/451/KPTS/013/2022 Tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.40 tahun 2022 tentang rencana Aksi daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan mengarah pada Terorisme tahun 2022-2024
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.35 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
7. Keputusan Walikota Surakarta No. 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kota Surakarta
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 351/448 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme



Audiensi finalisasi draft Pergub RAD PE Jateng 18 Okt 2022



FGD rancangan RAD PE Banten oleh Yayasan Empatiku dan AMAN Indonesia



Forum penyiapan RAD PE Jawa Timur pada 12 Januari 2022 oleh Fatayat NU Jawa Timur dan AMAN Indonesia



Forum penyiapan RAD PE Surakarta oleh YPP



Sosialisasi RAN PE Aceh 21 Januari 2022 oleh Balai Syura Aceh, AMAN Indonesia dan BNPT



Forum Pertemuan Nasional Multipihak - Infid



Koordinasi implementasi RAD PE Jawa Barat 12 September 2022 antara Kesbangpol dan Institut Perempuan



Pelatihan Pengarusutamaan Kabuoaten_Kota Ramah HAM di tujuh daerah karesidenan Surakarta pada 13 – 15 September 2022- oleh INFID



Proses diskusi dan lobi LIBU Perempuan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk penesahan RAD PE



Sosialisasi RAN PE Maluku pada 7 September 2022 oleh LAPPAN, AMAN dan BNPT



Worshop Pokja Tematis 13 Juni

Tantangan dan Hambatan

Hambatan terbesar dalam implementasi program RAN PE adalah keterbatasan sumber daya dan sumber keuangan yang dimiliki oleh masyarakat sipil, yang membuat sejumlah intervensi hanya berhenti sebagai *pilot project* atau hanya mampu melibatkan sejumlah kecil area.

Dari luar diri Pokja Tematis, sejumlah tantangan diidentifikasi mempersulit pencapaian sejumlah target diantaranya adalah:

- a. Kebijakan dan mekanisme pendanaan masyarakat sipil yang diatur oleh APBN atau non APBN masih belum jelas. Tingginya ketergantungan masyarakat sipil dengan pendanaan luar negeri, sebagai bukti bahwa pendanaan di internal Indonesia sebagai *middle income country* belum mendapatkan perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi yang menempatkan Indonesia sebagai negara *middle income*, seharusnya dibarengi dengan upaya memunculkan mekanisme pengelolaan *trust fund*, yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk pengembangan kerja-kerja pendampingan korban dan penguatan resiliensi masyarakat. Keberadaan wadah baru *trust fund* seharusnya dikelola dengan keterbukaan dan mengutamakan
- b. *Gap* pengetahuan yang dimiliki aktor nasional dan daerah atau aktor pemerintah dan nonpemerintah, seharusnya bisa dijembatani dengan upaya *capacity building* pada level pengambil keputusan berbagai level, dimana isu-isu kunci dalam RAN PE bisa ditransfer kepada aktor-aktornya
- c. Ruang pertukaran nasional dan daerah, pemerintah dan OMS, belum tercipta dimana secara reguler semua aktor bisa berbagi praktik-praktik baik bekerja dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme. Sebuah konferensi tahunan yang dibiayai pemerintah Indonesia seharusnya bisa dijadikan mekanisme pertukaran yang resmi, selain mempertemukan lintas aktor, juga sebagai ajang mempengaruhi sejumlah negara yang masih tidak percaya diri melibatkan perwakilan OMS dalam pengambilan keputusan.
- d. Masih sulitnya akses pada data yang valid terkait dengan jumlah dan posisi mantan napiter, deportan dan returni, berdampak pada mempersulit OMS untuk melakukan pendampingan pada para "mantan" dan membangun reintegrasi sosial

- e. Praktik budaya yang meminggirkan perempuan masih tinggi. Pada sejumlah perempuan korban terorisme, meninggalnya suami, berefek pada menipisnya relasi istri dan anak pada keluarga suami. Sejumlah keluarga mengambil alih hak atas kompensasi yang seharusnya diterima oleh istri dan anak-anak. Perempuan istri korban terorisme memutuskan tidak menikah lagi karena takut kehilangan hak asuh. Sehingga mereka yang secara penuh harus handle beban tersebut.

Membaca Tren Baru VE dan Pentingnya Reorientasi Intervensi

Pasca “gerakan 212” terjadi perubahan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat Indonesia untuk berubah menjadi lebih Islami. Gelombang perubahan yang sering kali disebut sebagai “hijrah” ini, melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. Strategi dunia komersial seperti periklanan dapat dengan jelas menangkap fenomena ini. Dimulai sekitar 5 tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan besar mulai menggunakan lebih banyak model berhijab dalam iklan produk-produk mereka. Produk-produk dengan sertifikasi halal juga masif dipromosikan dalam dunia periklanan, sebagai bukti bahwa riset perusahaan-perusahaan tersebut menangkap gelombang perubahan ini.

Meningkatnya gelombang islamisasi di Indonesia harus disikapi dengan bijaksana. Karena pada prinsipnya tidak ada yang salah saat orang-orang mulai belajar menjadi lebih religius. Orang-orang baik ini harus dibantu, karena literatur mereka soal agama tidak terlalu dalam. Di sisi lain kesempatan mereka untuk belajar agama dengan lebih baik tidak terlalu banyak. Bahkan terkadang jika mereka cukup memiliki waktu, tidak sedikit di antara mereka malu atau enggan untuk belajar ke lembaga formal yang mengajarkan ilmu keagamaan.

Solusi praktis yang mereka tempuh akhirnya adalah memanfaatkan *platform* media sosial dan berbagi media (audio dan video) di dunia maya. Sayangnya konten-konten keagamaan yang tersedia di dunia maya masih jauh dari nuansa moderat. Bahkan harus diakui bahwa ideolog-ideolog keagamaan dengan pendekatan hitam-putih (salafi, salafi wahabi, radikal) masih mendominasi disana. Ideolog/asatidz hitam-putih ini seringkali memberi solusi keagamaan yang sifatnya judgemental kepada yang menjalankan atau tidak menjalankan ritual keagamaan tertentu. Tidak jarang hingga pada tahap mengkafirkan, bahkan hingga berujung pada pembenaran penggunaan kekerasan hingga dehumanisasi.

Gerakan radikalisme saat ini berkembang dengan tren yang semakin beragam. Tidak hanya dilakukan perorangan atau kelompok dengan melakukan aksi yang jelas kentara, seperti yang dilakukan FPI, JI atau simpatisannya. Dalam satu setengah tahun terakhir, setidaknya ada tiga peristiwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh non tradisional *offender*. Dua dari tiga peristiwa tersebut kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana

terorisme. Para pelaku bukan berasal dari jejaring teror yang sudah dikenal sebelum ini, tapi berasal dari kelompok Islamis - ada yang punya latar belakang organisasi radikal namun *non-violence* - yang sebenarnya minim pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan teror. Ada sekitar selusin penangkapan dalam tiga peristiwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang Islamis ini. Dua peristiwa diantaranya dilakukan oleh perempuan, yang mana hal ini seharusnya menjadi catatan dan perhatian kita semua.

Pada tahun 2019 aparat keamanan Indonesia akhirnya membongkar gerakan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) pasca ditangkapnya Parawijayanto, pemimpin kelompok pengusung kekerasan yang disebut-sebut berada di balik peristiwa bom Bali I tahun 2002 silam. Setelah satu dekade lebih sejak dilarang pada tahun 2008, ternyata terungkap bahwa JI masih terus beroperasi dan bahkan telah merubah strategi perjuangan mereka dalam mewujudkan konsep Negara Islam atau penerapan syariat Islam dalam bernegara. Strategi yang disebut *Tamkin* ini pada dasarnya secara sederhana adalah strategi menempatkan diri di masyarakat.

Setidaknya ada tiga program utama kelompok JI dalam menjalankan strategi *Tamkin* ini. **Pertama**, Kegiatan Sosial dengan membentuk lembaga amal dan mengumpulkan dana dari masyarakat serta disalurkan dalam berbagai kegiatan sosial. **Kedua**, kegiatan Ekonomi (Bisnis Legal). Kelompok JI mendorong anggotanya untuk membuka berbagai usaha secara legal untuk tidak hanya sebagai sumber ekonomi bagi anggotanya, tapi juga menjadi kontribusi bagi organisasi. Perkebunan kelapa sawit, hotel atau penginapan syariah, bengkel dan berbagai usaha legal lain dijalankan oleh anggota kelompok yang pernah dipimpin oleh ustadz Abu Bakar Baasyir ini. **Ketiga**, Kegiatan Politik. Jamaah Islamiyah dalam kepemimpinan Parawijayanto mulai lebih rasional dalam menentukan model perjuangan politik mereka, yang pada awalnya menggunakan politik kekerasan (*political violence*) kemudian berubah menjadi politik praktis. Melihat besarnya perubahan beragama masyarakat muslim Indonesia -yang dilihat sebagai peluang besar untuk merubah konsep dasar negara- JI kemudian memutuskan ikut serta dalam percaturan politik praktis Indonesia dengan turut membentuk partai politik yang sedianya akan "berkompetisi" pada Pemilu 2024 nanti. Perubahan strategi kelompok yang oleh komunitas keamanan Internasional disebut sebagai kelompok paling berbahaya di Asia Tenggara ini harus menjadi kesadaran kita bahwa saat ini aktor dari kelompok teror ada disekitar kita.

Sementara itu, kondisi geopolitik global juga penting diwaspadai dapat mempengaruhi gerakan kekerasan ekstrim di Indonesia. Berhasilnya Taliban menguasai Afghanistan pada 2021 lalu setidaknya akan berdampak pada terinspirasi kelompok-kelompok pengusung kekerasan, mengadopsi semangat pantang menyerah kelompok Taliban yang selama 20 tahun lebih melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil. Anggota pengusung kekerasan yang pernah berjuang bersama Taliban di-era Uni Soviet - berasal

dari kelompok afiliasi Al Qaeda - dikhawatirkan tidak hanya terinspirasi, tapi juga memiliki hasrat untuk hijrah ke Afghanistan untuk berbagai alasan. Di sisi lain, Konflik Rusia dan Ukraina yang ternyata tak kunjung usai hingga kini juga harus menjadi perhatian kita. Karena saat Rusia berkampanye dengan menggunakan militer muslim Chechnya untuk melawan Ukraina, kelompok Islamis di Indonesia merespon hal tersebut dengan positif. Selain Taliban di Afghanistan dan konflik Rusia - Ukraina, isu-isu Palestina, Rohingya, Suriah, Turki, Irak dan lain-lain juga harus diperhatikan akan seberapa berpengaruh pada peta kekerasan ekstrim di Indonesia. Isu China dan Laut China Selatan adalah isu yang tak kalah menarik juga untuk diperhatikan

Jika melihat tren proses penegakan hukum dalam tiga tahun terakhir terhadap pelaku tindak pidana terorisme, ada fenomena menarik yang harus dicermati bahwa *the hot spot area* kelompok ekstremis kini mulai bergeser dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Wilayah Sumatera terlihat signifikan mengalami peningkatan jumlah kasus tindak pidana terorisme. Bahkan pada tahun lalu (2022), jumlah penangkapan di Sumatera melebihi jumlah penangkapan di Jawa. Hal ini harus diperhatikan dengan seksama, bukan hanya soal penyebaran ideologi radikal kekerasan di daerah Sumatera yang secara historis mungkin sudah terjadi sejak dulu. Tetapi juga kemungkinan mengenai bagaimana kesiapan daerah tersebut (baik pemerintah dan masyarakat) dengan semakin tingginya kasus terorisme di daerah mereka. Mengingat di daerah ini (pulau Sumatera) studi yang dilakukan oleh masyarakat sipil masih tergolong minim.

Jika merujuk pada jaringan teror yang aktif dan jadi ancaman nyata bagi keamanan di Indonesia, maka individual dan kelompok pro ISIS masih harus diwaspadai dalam jangka pendek ini. Serangan teror di Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih dilakukan oleh individu atau kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Apalagi induk kelompok ISIS di luar negeri -yang saat ini diperkirakan berada di Khurasan (daerah Afghanistan)- masih berkonsolidasi dan menyebarkan seruan-seruan yang mengancam dan direspon oleh pendukung mereka dimana-mana. Bom Polsek Astana Anyar di Bandung dan serangan di Time Square New York pada Desember tahun lalu, terjadi pasca beredarnya seruan untuk menyerang dari ISIS pusat.

Aktor-aktor baru mulai bermunculan dalam perekrutan, propaganda, dan fundraising gerakan ekstremisme. Seperti halnya dilakukan filantropi Indonesia, Aksi Cepat Tanggap pernah memberi sumbangan kepada kelompok pemberontak Syiah di Syria. Artinya, Jamaah Islamiah mulai melakukan kegiatan sosial, dengan memanfaatkan puluhan ribu kotak amal sebagai strategi.

Pelibatan perempuan dalam gerakan ekstremisme sebagai aktor juga masih cukup besar jumlahnya. Di tahun 2022, BNPT melaporkan ada 7 orang yang ditangkap. 4 di antaranya masih dalam investigasi, sedangkan 3 orang lainnya dipulangkan karena tidak cukup data yang membuktikan bahwa perempuan dapat terlibat dalam kelompok terorisme.

Padahal secara grafiknya, tren keterlibatan perempuan dalam ekstremisme cukup cepat dan signifikan. Selain itu, tren dan rekrutmen pelibatan perempuan dan anak dalam terorisme tidak lagi terstruktur dan sistematis, melainkan sporadis dan dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Indonesia memilih untuk menggunakan salah satu pendekatan lain yakni RAN PE. Dengan adanya beberapa program terkait P/CVE, tentu saja membicarakan reintegrasi terkait 600 orang yang masih terdampar dan seluruh masyarakat Indonesia yang harus kita bantu dalam pencegahan. Kolaborasi antara pemerintah, OMS, dan Pokja Tematis RAN PE ini sangat baik karena OMS memiliki data di lapangan yang diperoleh dari program pendampingan.

Beberapa hal menjadi bahasan penting untuk agenda OMS ke depan di tahun 2023, terkait dalam kondisi apa perempuan mampu menjadi ideologi, yang memobilisasi dirinya sendiri dan mampu memobilisasi kelompoknya untuk melakukan aksi terorisme. Kemudian, dalam konteks tahun pemilu yang diselenggarakan kurang lebih 2 tahun lagi, fenomena yang terjadi ialah kelompok yang Islamis kemudian berpolitik, dan tentunya ada ancaman yang sangat nyata. Mengingat hal-hal terkait isu agama mulai menjadi isu yang sensitif dan memicu gesekan di masyarakat Indonesia

6

Rekomendasi-Rekomendasi

Berkaca dari kerja-kerja OMS selama 2022, dan tren perkembangan ekstremisme kekerasan di Indonesia, sejumlah rekomendasi disampaikan di antaranya adalah:

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Sekber mendukung penguatan *gender mainstreaming* di seluruh pokja melalui persetujuan penggunaan alat audit gender untuk pelaksanaan RAN PE di seluruh Pokja Sekber dan kementerian lembaga
2. Sekber memastikan praktik-praktik baik penguatan *gender equality* and pemberdayaan perempuan terdokumentasikan dengan baik melalui penyelenggaraan konferensi tahunan nasional dan internasional dan penerbitan buku praktik baik perempuan dan CVE di Indonesia

BIDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

1. Mendorong LPSK untuk melengkapi database korban terorisme dengan *profiling* korban terorisme berbasis pada data terpilih, status penerima kompensasi, status pemulihan trauma, ekonomi, melalui kerjasama dengan lembaga *think tank* dan organisasi masyarakat
2. Sekber menggunakan Forum Kemitraan Strategis untuk mendorong agenda pemulihan korban terorisme berkelanjutan, melalui studi evaluasi riset/ *think tank* pada prosedur pemberian kompensasi dan dukungan layanan psikososial jangka panjang
3. Sekber memperkuat dukungan penguatan kelembagaan perempuan korban dan penyintas mengarah kepada

kemandirian, melalui membangun forum komunikasi antara Pokja Tematis Bidang PUG dengan sejumlah kementerian/ lembaga (KPPPA, BNPT, Komnas Perempuan, KPAI dan Kemensos)

BIDANG KETERLIBATAN PEMUDA

1. Sekber memperkuat intervensi pada lembaga pendidikan untuk melakukan pencegahan PE, dengan memfasilitasi kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Pokja Tematis bidang keterlibatan anak muda untuk membicarakan sinergi kerja membumikan kurikulum merdeka belajar khususnya program P5
2. Sekber memperkuat alignment RAN PE dengan Youth, Peace and Security melalui pembentukan forum lintas aktor untuk menginstitutionalisasi YPS dalam bentuk rencana aksi di bawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

BIDANG KESIAPSIAGAAN NASIONAL

1. Sekber mendorong institutionalisasi sejumlah praktik baik yang dilakukan masyarakat sipil melalui pengeluaran rekomendasi kepada kementerian lembaga terkait untuk mengadopsi sejumlah model SITI, Desa Damai, Sekolah Perempuan Perdamaian sebagai unsur-unsur penting pendukung kesiapsiagaan dini.
2. Sekber mendorong kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat OMS melalui sinergi program penguatan kesiapsiagaan di daerah yang didukung oleh APBD atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BIDANG KOMUNIKASI STRATEGIS

1. Sekber mengarahkan K/L terkait yang mengadakan/ berkolaborasi dengan OMS dalam mengadakan kampanye kontra ekstremisme, untuk mengalihkan fokus dari model reaktif dan kontra narasi terhadap ekstremisme, menjadi mengkampanyekan inspirasi dan praktik sukses perdamaian dan toleransi.

2. Sekber memfasilitasi kampanye toleransi bersama antara KL dan OMS, melalui kerjasama konten kontra narasi yang berfokus pada perdamaian dan inklusivitas agama-agama dan kepercayaan, dengan model narasi story telling tentang harmoni hidup bersama yang berbeda.
3. Sekber mendorong penguatan PUG dalam produksi konten di pilar pertama, melalui kerjasama aktivitas komunikasi strategis untuk menerapkan perspektif PUG dan pentingnya pemenuhan hak-hak korban (khususnya perempuan dan anak) pada aktivitas penyajian narasi kontra terhadap ekstremisme. Model narasinya berupa penyajian kisah inspirasi perempuan mandiri yang tidak melulu taat kepada pasangannya ketika pasangan memiliki pandangan yang keliru (seperti mengajak melakukan aksi teror), dengan bersumber kepada teks-teks keagamaan.

BIDANG REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

1. Sekber memastikan kebijakan sharing data terkait dengan kepentingan reintegrasi sosial diberlakukan untuk anggota Pokja, melalui membangun kesepahaman internal antara Pokja Pencegahan dengan Pokja Tematis agar akses pada data jumlah mantan napiter, deportan dan returne yang memerlukan dukungan reintegrasi sosial dan pendampingan masyarakat sipil dibuka dengan prinsip akuntabilitas
2. Sekber mendorong *review* kebijakan reintegrasi sosial kepada Dirjen PAS agar lebih partisipatoris dan memastikan pelibatan perempuan, melalui forum review kebijakan terkait dengan reintegrasi sosial, mendengarkan praktik baik OMS reintegrasi sosial dengan pendekatan dialog, dan membangun grant desain bersama reintegrasi sosial dengan pendekatan baru.

3. Sekber memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak (BNPT, Densus 88, Dirjen PAS dan OMS) sebelum pemulangan narapidana teroris, deportasi atau returnis, sehingga OMS bisa menyiapkan berbagai elemen dimasyarakat di saat pemulangan atau reintegrasi sosial dilakukan.

BIDANG HUKUM DAN HAM

1. Sekber memastikan pembelajaran dan praktik-praktik baik pelaksanaan RAN PE terdokumentasi secara reguler dengan cara mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi di nasional dan daerah untuk memantau efisiensi pelaksanaan RAN PE / RAD PE,
2. Sekber memperkuat dukungan penurunan RAD PE dalam bentuk RAD PE di kabupaten dan daerah, melalui pembentukan forum Multi Pihak Nasional dan Daerah dan peluncuran penghargaan bagi daerah terbaik

1 Pokja Tematis, Menjaga Ruang Sipil Demokrasi

Hadirnya Kelompok Kerja (Pokja) Tematis sebagai mekanisme keterlibatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan pemuda dalam kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih ada. Disahkan melalui Keputusan BNPT No. 299 Tahun 2022 tentang Pokja Tematis, kehadiran sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan dan pemuda, tidak saja menciptakan ruang berdialog dengan anggota Sekretariat Bersama RAN PE, yang terdiri dari sejumlah Kementerian dan Lembaga, tetapi mendorong pemerintah untuk me-*re-*kognisi kerja-kerja penting yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS). Ditambah lagi, kehadiran pokja tematis juga mendorong terwujudnya *join reporting mechanism* antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Pembentukan Pokja Tematis merupakan mandat dari Keputusan Kepala BNPT No. 129 Tahun 2021 tentang Sekretariat Bersama RAN PE Tahun 2020-2024. Diadvokasi oleh masyarakat sipil dalam serangkaian aktivitas yang mengarah pada penyiapan pembentukan pokja, mulai dari lokakarya pembentukan, hingga sosialisasi dan penyiapan teknis. Konsultasi dan lokakarya pembentukan (9-10/2/2022) menghadirkan 60 orang perwakilan masyarakat sipil yang merumuskan rancang bangun Pokja Tematis termasuk di dalamnya konsep dasar, prinsip kerja, mandat, dan tata koordinasi kelompok kerja tematis sebagai bagian dari unsur kesatuan Sekretariat Bersama RAN PE. Pertemuan ini juga menghasilkan rancangan mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi untuk mengukur akuntabilitas kerja Pokja Tematis. Difasilitasi oleh Working Group on Women and PCVE (WGWC) dan AMAN Indonesia berkolaborasi dengan BNPT dan didukung oleh AIPJ2, sosialisasi dan penyiapan teknis (13/7/22) menghasilkan pengelompokan Pokja Tematis menjadi 7 bidang (Pengarusutamaan Gender; Perlindungan saksi dan Pemenuhan Hak-Hak korban; Pelibatan Pemuda; Komunikasi Strategis; Kesiapsiagaan Nasional; Rehabilitasi dan Reintegrasi; serta Hukum dan HAM) yang didiskusikan berdasarkan keragaman kerja-kerja OMS (Hasil lengkap forum dapat dilihat di dokumen [Berita Acara](#)).

Sebagai ruang partisipasi formal OMS dalam pengambilan keputusan, keberadaan Pokja Tematis seharusnya bisa menjadi dinamisator di dalam Sekber RAN PE, dimana pemerintah juga didorong untuk keluar dari intervensi yang berbasis “checklist”, dan mulai menerapkan kerjasama dengan OMS untuk bisa mencapai dampak yang lebih maksimal. Meskipun kehadiran Pokja Tematis belum membuka kerjasama lebih luas dalam tubuh pemerintah, tetapi contoh kerjasama yang digagas antara AMAN Indonesia, WGWC dengan BNPT, terbukti tidak saja mengkondusifkan pemerintah daerah untuk menurunkan aturan RAN PE ke dalam regulasi daerah, tetapi juga mensentralkan peran perempuan dan organisasi perempuan dalam memastikan *gender mainstreaming* terjaga.

Di masa depan, koordinasi antara Pokja Tematis dan ruang dialog yang setara dengan pemerintah, tidak saja membawa Implementasi RAN PE keluar dari *business as usual*, tetapi juga membantu pemerintah Indonesia untuk selalu peka terhadap gender dan prinsip HAM, jika diperlukan *mainstreaming* di seluruh intervensi program RAN PE. Jika *mainstreaming* gender menguat, maka potensi memperkecil keterlibatan perempuan dalam ekstremisme, dan perlindungan anak-anak dari terorisme juga akan semakin membaik.

2

Memperkuat Daerah dalam Implementasi RAN PE

Kini telah ada lima RAD PE di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah, yang tidak bisa dipungkiri merupakan kerja keras masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan sebagai *leading sector* untuk mewujudkan peraturan daerah terkait PE yang peka gender, memastikan terakomodirnya elemen korban, dan partisipasi masyarakat sipil. Sebagai bagian dari desain intervensi jaringan WGWC, *localizing* RAN PE dijadikan sebagai ruang strategis untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam mempertebal indikator gender dalam implementasi RAN PE di daerah. Proses intensif dialog terkait pentingnya analisis gender dan sejumlah indikator gender dimasukkan dalam RAD PE, di satu sisi

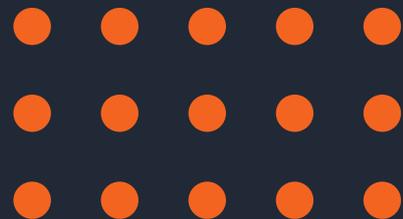
membantu pemerintah untuk menurunkan strategi *gender mainstreaming*, tetapi juga membuka ruang saling memperkuat terkait dengan kerentanan perempuan dan anak-anak dalam konteks ekstremisme kekerasan.

Melalui kerjasama dua jaringan, yaitu AMAN Indonesia dan WGWC, didukung BNPT, maka proses di ke-lima provinsi yang dipimpin oleh perempuan dan organisasi perempuan, telah menciptakan proses dan hasil yang berbeda. Secara proses, konsolidasi dan koordinasi masyarakat sipil di daerah dipimpin langsung oleh organisasi di daerah, seperti Balai Syura Ureung Inong Aceh (Aceh), Institut Perempuan (Jawa Barat), Percik (Jawa Tengah), Fatayat NU (Jatim), Libu Perempuan (Sulteng), dengan melibatkan banyak aktor, OMS, *think tank*, akademisi, pemuda termasuk kelompok perempuan korban terorisme, kelompok minoritas, dan sejumlah aktor yang memiliki kepentingan terhadap RAD PE.

Forum *Multi Stakeholders* tingkat Jawa Timur, dan Jawa Barat yang diinisiasi oleh INFID terbentuk sejak 2020 telah berkontribusi dalam menopang implementasi RAD PE, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas peran dan kerjasama antara pemerintah dan OMS dalam rangka penanganan dan pendampingan deportan dan returni, termasuk perempuan dan anak. Forum ini berkontribusi dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah dan OMS, termasuk menghubungkan berbagai pihak yang saling berkaitan sehingga mendorong pada terbentuknya inisiasi kolaborasi dari hulu ke hilir dan yang lebih berkelanjutan.

Penguatan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, termasuk tim koordinasi (Pokja dan Tim Terpadu/Timdu), termasuk di dalamnya aktor kunci pemerintah, OMS, dan tokoh agama perempuan melalui *series training* yang dilakukan atas kerjasama WGWC, AMAN Indonesia, BNPT dan KPPPA juga menjadi praktik baik dalam mendorong implementasi RAN PE dan kerja-kerja P/CVE yang peka gender.

Di samping itu, penguatan aktor-aktor kunci di daerah juga dilakukan melalui sejumlah program edukasi tentang perdamaian dan P/CVE yang menasar institusi-institusi pendidikan. Berbagai inisiatif mulai dari Sekolah Damai (Wahid Foundation) dan Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Maarif (Ma'arif Institute),



3

Membuka Ruang Perjumpaan di Kalangan Pemuda oleh Pemuda: Membangun Sinergi Pemikiran, Strategi, dan Sumber Daya

Kolaborasi setara yang dilakukan pemuda dapat membangun sinergi pemikiran, strategi, dan pendekatan serta sinergi sumber daya untuk menciptakan perubahan yang berdampak besar melalui ruang-ruang perjumpaan yang diinisiasi oleh pemuda.

Pertama, memfasilitasi ruang perjumpaan dengan menghadirkan gagasan perdamaian di sekolah dan kampus sebagai rumah kedua. Institusi pendidikan seharusnya secara merdeka bisa menjamin generasi muda Indonesia untuk mendapatkan cara berpikir kritis, menciptakan budaya menghormati perbedaan, dan menjaga rasa aman dari bahaya kekerasan berbasis gender dan seksual.

Melalui gerakan penghapusan tiga dosa besar yang menjadi kebijakan KemendikbudRistek, gerakan anak muda mendorong perdamaian di institusi pendidikan menjadi strategis. Peace Leader Indonesia membuka ruang-ruang perjumpaan antar siswa untuk mengenal konsep menghormati perbedaan, termasuk pentingnya menghormati perbedaan fungsi tubuh perempuan dan laki-laki, agar saling hormat dan melindungi melalui Peace Goes to School/Campus (PGS). Dengan berbagai pendekatan seperti *boardgame*, *talkshow*, dialog, anak-anak remaja dibawa dalam ruang refleksi bersama tentang

ketidaknyamanan dalam sekolah terkait dengan tiga dosa besar, dan kemudian diajak untuk membangun solusi bersama, dimana sekolah memberikan dukungan sepenuhnya. Dukungan sekolah dan kedinasan dalam bergerak mendorong Peace Leader masuk ke sekolah-sekolah, memberikan warna baru sinergi lintas aktor yang lebih menjanjikan. Bersama konsep Merdeka Belajar, kini format PGS disiapkan mendukung pencapaian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Peace Generation menginisiasi HOPE (Heroes of Peace & Ecology), pelatihan untuk siswa SMP dalam hal peningkatan kesadaran atas isu perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan lingkungan, serta menysasar civitas kampus dengan program *mentoring* berbasis media kreatif dan teknologi untuk mengasah keterampilan sosio-emosional dalam rangka membangun ketahanan terhadap ekstremisme kekerasan (Frosh Project ID). Juga memfasilitasi ruang perjumpaan antar siswa sekolah yang berbeda, untuk meruntuhkan prasangka dan berkolaborasi melalui *Breaking Down the Wall*, program pengajaran pendidikan perdamaian berbasis mata pelajaran sekolah disertai *project-based learning*.

Kedua, ruang-ruang perjumpaan anak muda lainnya, seperti Peace Service melakukan kunjungan dan kerja bakti di rumah ibadah, Dialog antar Iman, Ngopeace (dialog perdamaian di kafe-kafe), Kemah Kebangsaan, Jambore Pelajar Teladan Bangsa, serial seminar Indonesia Rumah Bersama, Youth Camp, Peace Camp, Girls Talk, dan Girls Camp tidak saja memberikan pengalaman baru bagi para pemuda lintas iman untuk mengenal perbedaan dan membangun pondasi karakter damai, tetapi membukakan pengetahuan baru tentang narasi-narasi damai yang bersumber dari

kitab suci dan praktik keagamaan yang sering sulit diakses oleh anak-anak muda.

Ruang diskusi yang sehat dengan para tokoh agama-agama saat melakukan kunjungan rumah ibadah, adalah ruang aman buat para pemuda lintas iman untuk menggali konsep dasar perdamaian berbasis pada kitab suci. Termasuk ruang dialog antar agama yang diciptakan oleh sejumlah organisasi pemuda, berhasil meletakkan yang “tabu” bicara agama orang lain, menjadi hal yang menyenangkan.

Anak muda lintas iman menemukan narasi damai yang bersumber dari kitab suci dan praktik keagamaan yang menghantarkan anak muda menjadi *peace messenger* pada keluarga dan komunitasnya. Tidak sedikit orang tua terkejut dengan postingan anak-anak mereka yang mengikuti program Kunjungan Rumah Ibadah atau Ngopeace, karena dianggap masuk wilayah yang rawan

yaitu aqidah. Tetapi anak-anak muda ini bisa meyakinkan kepada orang tua mereka bahwa ruang perjumpaan dengan yang berbeda yang difasilitasi oleh lembaga seperti Peace Leader Indonesia, Peace Generation, Jaka Tarub, Maarif Institute, dan Gusdurian mampu mentransformasi mereka menjadi pribadi yang lebih *peaceful* dan bertanggungjawab.



4

Reintegrasi Sosial dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat

Faktor paling menentukan dalam reintegrasi sosial mantan napiter dan pendukung ISIS adalah penerimaan sosial yang utuh. Pemerintah selama ini banyak menggunakan *client-based approach*, yaitu pendekatan yang lebih mempersiapkan para mantan napiter, deportan, dan returni agar siap berinteraksi dengan masyarakat. Kelemahan pendekatan ini adalah kurang memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menerima mereka secara utuh, dan kemampuan menghandle stigmatisasi, ketakutan, dan mencegah dari radikalisasi baru.



WGWC, sebuah jaringan nasional untuk penguatan *gender mainstreaming*, memperkenalkan pendekatan baru dalam mendorong reintegrasi sosial, yakni dialog. Dipimpin oleh Yayasan Empatiku, dengan melibatkan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Ruangobrol.id, dan AMAN Indonesia, dengan sebuah percontohan, yaitu Kelurahan Resilien, dikerjakan dengan kolaborasi Kelurahan Mekarjaya, Depok. Pendekatan membangun resiliensi memfokuskan empat elemen, yaitu penguatan kapasitas tim terpadu (perpaduan masyarakat dan perwakilan Pemerintah Kelurahan), deteksi dini, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Meminjam sebuah alat dialog bernama *Reflective Structured Dialogue (RSD)* dan *Restorative Practice (RP)*, yaitu upaya mengurangi kekerasan, intimidasi, dan kejahatan, memperbaiki perilaku masyarakat, dan memulihkan hubungan dan kerusakan. Kedua pendekatan di atas dilakukan dengan *dialogue circle* (kecil) dan dialog besar (rekonsiliasi dan membangun konsensus) dengan seluruh komponen inti. Ada dua lapis dialog, *pertama*, dialog berbentuk *circle*, yaitu dialog yang dihadiri oleh 7-10 orang, dengan pelibatan klaster pemuda, pemegang otoritas, sektor keamanan, tokoh agama/komunitas, perempuan, para mantan napiter-deportan-returni, korban terorisme yang kesemuanya ada di lingkungan Mekarjaya. Total warga yang terlibat adalah 48 orang mewakili semua klaster di atas. Dengan pendekatan *restorative practice (RP)*, mereka mengungkapkan ketakutan mereka akan hadirnya mantan napiter dan keluarga. Warga mau terbuka dan terlibat aktif karena diikat dengan kesepakatan komunikasi untuk menghormati, mendengarkan, dan tidak menghakimi.

Kedua, setelah seluruh perwakilan warga terbuka, maka fasilitator (WGWC) mengundang mereka dalam forum besar dialog dengan menggunakan pendekatan RSD, dimana semua perwakilan masyarakat yang terlibat dalam dialog *circle* dihadirkan, termasuk mantan napiter dan keluarganya. Di forum besar ini, semua orang sudah siap menyatakan “menerima” dan “diterima”, setelah mantan napiter dan keluarga menyatakan maaf dan ingin kembali ke masyarakat.

Proses menerima dan diterima dalam sebuah dialog besar inilah yang menjadi landasan pihak Kelurahan Mekarjaya menyusun program membangun resiliensi, dimana para mantan napiter dan keluarganya dilibatkan secara aktif dan interaksi warga dengan keluarga ini dibuka. Proses penerimaan awal ini menandai babak baru di Kelurahan Mekarjaya untuk melanjutkan proses membangun resiliensi dengan fasilitasi sejumlah lembaga yang tergabung dalam WGWC.

Kontribusi OMS dalam memperkuat integrasi sosial para mantan napiter dan keluarganya juga didekati dengan kerangka kerja *Community Based Correction (CBC)*, yang dikembangkan oleh YPP di Jawa Tengah. Dalam konteks CBC, pelibatan masyarakat sangat dianjurkan, karena merekalah yang akan menentukan apakah para mantan napiter dan keluarganya ini akan berproses secara baik dalam disengagement secara permanen dengan ideologi radikal dan kelompoknya. CBC berperan penting dalam mengurai beban reintegrasi, dan menguatkan

bimbingan lanjutan sebagai *aftercare* pasca klien bebas dari pembinaan.

Ke depan, reintegrasi sosial diharapkan akan semakin baik dengan keterlibatan penuh masyarakat sipil, dimana mereka bisa memberikan pendampingan secara maksimal bersama dengan pemerintah daerah. Apalagi ditunjang dengan sejumlah kebijakan yang secara langsung mendukung deradikalisasi, rehabilitasi maupun reintegrasi sosial, dimana peran masyarakat sipil menguat, secara signifikan akan mengubah wajah reintegrasi sosial dari *client-based* menjadi *community-based*.

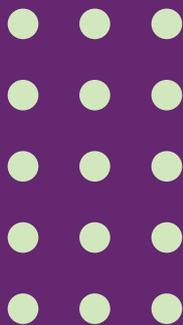
Dalam meningkatkan kepemilikan komunitas dan lokal serta partisipasi pemerintah, upaya reintegrasi akan lebih berkelanjutan jika pemerintah daerah mengakui dan mengadopsi skenario program ketahanan jangka panjang untuk reintegrasi dengan terus mendukung tim ketahanan lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda.

5

Peran Ulama Perempuan dalam Kontra Narasi

Keputusan orang masuk dalam kelompok Ekstremis, di antaranya karena dipengaruhi oleh narasi. Narasi dengan konten yang berlapis, mampu menggerakkan seseorang untuk menelusuri lebih jauh ajaran-ajaran terkait dengan hijrah dan jihad. Baik menciptakan kontra narasi maupun narasi alternatif, telah terbukti akan memitigasi perkembangan radikalisme di Indonesia. Ulama telah terbukti memainkan peran kunci dalam membangun narasi kontra maupun narasi alternatif. Mereka pemegang otoritatif tafsir agama, yang saat ini mendominasi konten-konten di media sosial dan berbagai *platform* media.

Kelompok ulama telah aktif dalam memproduksi konten-konten kontra narasi maupun narasi alternatif di berbagai *platform* media. CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melatih 79 orang ustadz dan ustadzah di wilayah Palembang, Makassar, Jabodetabek dan Yogyakarta, untuk membekali mereka *skill* kontra narasi ekstremis. Alumni pelatihan ini membentuk Jaringan Pesantren Moderat (JPM) di Sulawesi Selatan. Mereka aktif menyebarkan narasi alternatif melalui ceramah dan khutbah di pesantren dan masjid-masjid wilayah mereka. Mei 2022 lalu, JPM melayangkan *press release* dan opini di media terkait penangkapan terduga teroris di Sulawesi Selatan dan melakukan audiensi dengan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Sulawesi Selatan.



Di tingkat nasional, lahirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), sebagai payung ulama perempuan di Indonesia telah membuktikan memiliki kekuatan membangun narasi alternatif untuk isu gender dan Islam. Tahun 2022, KUPI menyelenggarakan kongres kedua yang membawa 1.600 ulama perempuan dari 32 negara, untuk mengeluarkan lima fatwa penting, yaitu perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan, kehamilan akibat perkosaan, kekerasan berbasis agama, serta kerusakan lingkungan.

Cara pandang KUPI yang meletakkan semua tafsir agama haruslah berbasis pada pengalaman dan pengetahuan perempuan, selain memberikan perlindungan pada korban, juga mempromosikan konsep Islam *rahmatan lil'alam* (rahmat untuk semua), dengan tafsir yang inklusif. Mereka telah berhasil menyakinkan publik dan parlemen dalam mengadopsi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Termasuk secara berani membuka dialog dengan kelompok-kelompok Islamis yang cenderung menolak, melakukan kontra narasi di media sosial (medsos) tentang salah pikir terhadap RUU TPKS, serta mengeluarkan fatwa perlindungan perempuan dari bahaya kekerasan seksual. Kekuatan narasi kontra dan alternatif mereka adalah pada cerita pengalaman perempuan dan referensi yang mendukung perlindungan perempuan dari bahaya kekerasan seksual.

Sebagai bentuk dan wujud kontribusi KUPI dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan, Halaqoh Pra KUPI-2 menghasilkan “Buku Saku: Perempuan dan Ekstremisme Kekerasan dalam perspektif Islam”, yang berisi sejarah ekstremisme hingga rekomendasi intervensi dan peran perempuan, yang difasilitasi oleh AMAN Indonesia.

Dengan fatwa baru, khususnya terkait perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis agama, KUPI akan menjadi payung gerakan keulamaan perempuan untuk melakukan produksi dan diseminasi narasi kontra dan alternatif yang mendiskriminasi perempuan dan potensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya itu, narasi alternatif yang melandaskan pada pengalaman perempuan juga berpotensi tinggi untuk melawan narasi gender propaganda kelompok radikal dan ekstrem.

8

Penutup

Terbitnya laporan Pokja Tematis diharapkan bisa memenuhi harapan publik di daerah, nasional dan internasional dalam mendapatkan update kerja-kerja masyarakat sipil Indonesia dalam mendukung implementasi RAN PE. Sejak hadirnya Pokja Tematis, kekuatan masyarakat sipil telah mulai terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan lebih baik untuk mengatur langkah-langkah bersama dalam intervensi di berbagai lapis kerja-kerja tiga pilar PE.

Laporan tahunan ini diterbitkan sebagai upaya memberikan ruang berekspresi masyarakat sipil Indonesia yang telah menunjukkan dedikasinya dalam mengawal perjalanan RAN PE, juga sebagai wujud komitmen akuntabilitas publik. Semoga dengan membaca laporan Pokja Tematis ini, publik mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kerja-kerja OMS di 7 bidang dan 3 pilar dalam RAN PE.

Sejumlah rekomendasi diajukan kepada Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE sebagai leading sector utama dalam koordinasi di RAN PE, dengan harapan Sekber bisa menjadi jembatan komunikasi Pokja Tematis dengan ketiga Pokja lainnya untuk memperkuat prinsip HAM dan gender sensitivity, serta membuka potensi kolaborasi lintas Pokja sehingga sinergi gagasan, strategi dan sumberdaya bisa tercipta.



Sosialisasi dan Penyiapan Teknis Pokja Tematis Sekretariat Bersama RAN PE 09 Juni 2022 difasilitasi WGWC dan AMAN Indonesia



Sosialisasi dan Penyiapan Teknis Pokja Tematis Sekretariat Bersama RAN PE 09 Juni 2022 difasilitasi WGWC dan AMAN Indonesia



Sosialisasi dan Penyiapan Teknis Pokja Tematis Sekretariat Bersama RAN PE 09 Juni 2022 difasilitasi WGWC dan AMAN Indonesia



Sosialisasi dan Penyiapan Teknis Pokja Tematis Sekretariat Bersama RAN PE 09 Juni 2022 difasilitasi WGWC dan AMAN Indonesia

No	BIDANG	LEMBAGA
1	Koordinator Bidang Pengarusutamaan Gender	The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
		PP Fatayat NU
Anggota		Percik Institute
		Laboratory of Indonesian Global Study (LIGS) Universitas Muhammadiyah Jakarta
		Working Group on Women and P/CVE (WGWC)
		Balai Syura Ureung Inong Aceh
2	Koordinator Bidang Perlindungan Saksi dan Pemenuhan hak-hak korban	Yayasan Keluarga Penyintas
		Yayasan Penyintas Indonesia
Anggota		LIBU Perempuan, Sulawesi Tengah
3	Koordinator Bidang Keterlibatan Pemuda	Peace Leader Indonesia
		Peace Generation
Anggota		Girl Ambassadors for Peace (GA4P) Indonesia
		Fatayat NU Jawa Timur
		Koalisi Anak Muda untuk Indonesia Damai (KAMI Damai)
		Duta Damai
		Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC) Indonesia
		INFID
4	Koordinator Bidang Komunikasi Strategis	RuangObrol.id
		El Bukhari Institute
Anggota		Peace Generation
		Jaringan Gusdurian
		Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR)
5	Koordinator Bidang Kesiapsiagaan Nasional	Wahid Foundation
Anggota		Civil Society Against Violent Extremism (C-Save)
		Ma'arif Institute
		The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
		Yayasan Empatiku
		Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
		Institut Titian Perdamaian

6	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial	Yayasan Prasasti Perdamaian
		Society against Radicalism & Violent Extremism Indonesia (SeRVE Indonesia)
Anggota		Indonesia Moslem Crisis Center (IMCC)
		Fatayat NU Jawa Timur
		Yayasan Empatiku
		Civil Society Against Violent Extremism (C-Save)
		Division for Applied Social Psychology Research (DASPR)
		RuangObrol
		Yayasan Debintal
		Forum Aktivistis Akhlakulkarimah Indonesia (FKAAI)
7	Koordinator Bidang Hukum dan HAM	Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta
		Percik Institute
Anggota		INFID
		Yayasan Inklusif
		Yayasan Prasasti Perdamaian
		Institut Perempuan



Catatan



Kelompok Kerja Tematis RAN PE



Didukung oleh

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2